

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERIKANAN**

**Jl. K. H. Ahmad Dahlan Komp. TPI Bonehalang No.
Benteng - Selayar**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sementara proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan tata cara dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik. Diharapkan RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses dan tujuan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terarah.

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2026 ke depan.

Benteng, September 2021

KEPALA DINAS

Ir. MAKKAWARU

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630120 198910 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1.1 Tugas dan fungsi Dinas Perikanan	10
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan	10
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan	21
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	21
2.2.2 Sarana dan Parasarana Kantor	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	40
2.4.1 Tantangan Pelayanan	40
2.4.2 Peluang Pelayanan	41
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra Kementrian KP dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulawesi Selatan	57
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian KP	57
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan	62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	66
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	66
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	71

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1 Tujuan	76
4.2 Sasaran	78
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
5.1 Strategi	89
5.2 Arah Kebijakan	93
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	95
6.1 Program Strategis Pembangunan Daerah	95
6.1.1 Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)	95
6.1.2 Gerakan Membangun Desa Mandiri	101
6.2 Program dan Kegiatan Dinas Perikanan	102
6.3 Kelompok Sasaran	104
6.4 Pendanaan Indikatif.....	105
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	112
BAB VIII. PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Golongan	21
Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Jabatan	21
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	21
Tabel 2.4 Sarana dan Operasional Penunjang Pembangunan Perikanan	22
Tabel 2.5 Sarana dan Perlengkapan Kantor	23
Tabel 2.6 Perbandingan Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	26
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2016 – 2020...	26
Tabel 2.8 Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2020	28
Tabel 2.9 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020	31
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pembangunan KIPT Hangkoang	35
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perikanan Kabupaten Kep. Selayar	42
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	44
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan Sasaran Renstra KKP	60
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan Sasaran Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan	64
Tabel 3.5 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD	70
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	73
Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis	73

Tabel 3.8	Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan	74
Tabel 4.1	Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD ke dalam Tujuan Renstra Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan	77
Tabel 4.2	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan	78
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2022-2026	84
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan	93
Tabel 6.1	Matriks Tahapan Pembangunan KIPT	98
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2022-2026	106
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	116

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Bagang Struktur Organisasi Dinas Perikanan	20
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2016-2020	25
Gambar 2.3 Perbandingan Kontribusi Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Terhadap Total Produksi Perikanan	27
Gambar 2.4 Grafik Capaian Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kab. Kep. Selayar Tahun 2016-2020	29
Gambar 2.5 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Menurut Wadah di Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2016 – 2020.....	29
Gambar 2.6 Capaian Produk Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	30
Gambar 2.7 Capaian Kinerja Konsumsi Ikan Tahun 2016 – 2020	31
Gambar 2.8 Capaian Kinerja Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020	33
Gambar 2.9 Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2016-2020	33
Gambar 2.10 Komposisi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	37
Gambar 4.1 Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan	83
Gambar 5.1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	92
Gambar 6.1 Peta Skema Keterkaitan Sentra KIPT Hangkoang dengan Kawasan Sub Sentra Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar	96
Gambar 6.2 Peta Rencana Pembangunan KIPT Hangkoang	97

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan terletak pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana secara khusus pembangunan subsektor perikanan menekankan pada kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di sektor perikanan serta pada aspek pemenuhan ketersediaan pangan dan gizi. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari keberhasilan dan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang diamanatkan. Dinas Perikanan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkontribusi dalam pembangunan daerah dan tetap berkewajiban untuk selalu memenuhi tujuan dan hakekat pembangunan tersebut. Olehnya itu Dinas Perikanan memerlukan suatu perencanaan yang sistematis dan terpadu guna meningkatkan keberhasilan dan capaian pembangunan ke depan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan dan pilihan alternatif serta keputusan yang didasarkan pada data dan informasi sebagai bahan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan melalui optimalisasi sumberdaya secara komprehensif dengan berpegang pada prinsip prioritas sehingga dapat terarah menuju pencapaian tujuan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra)

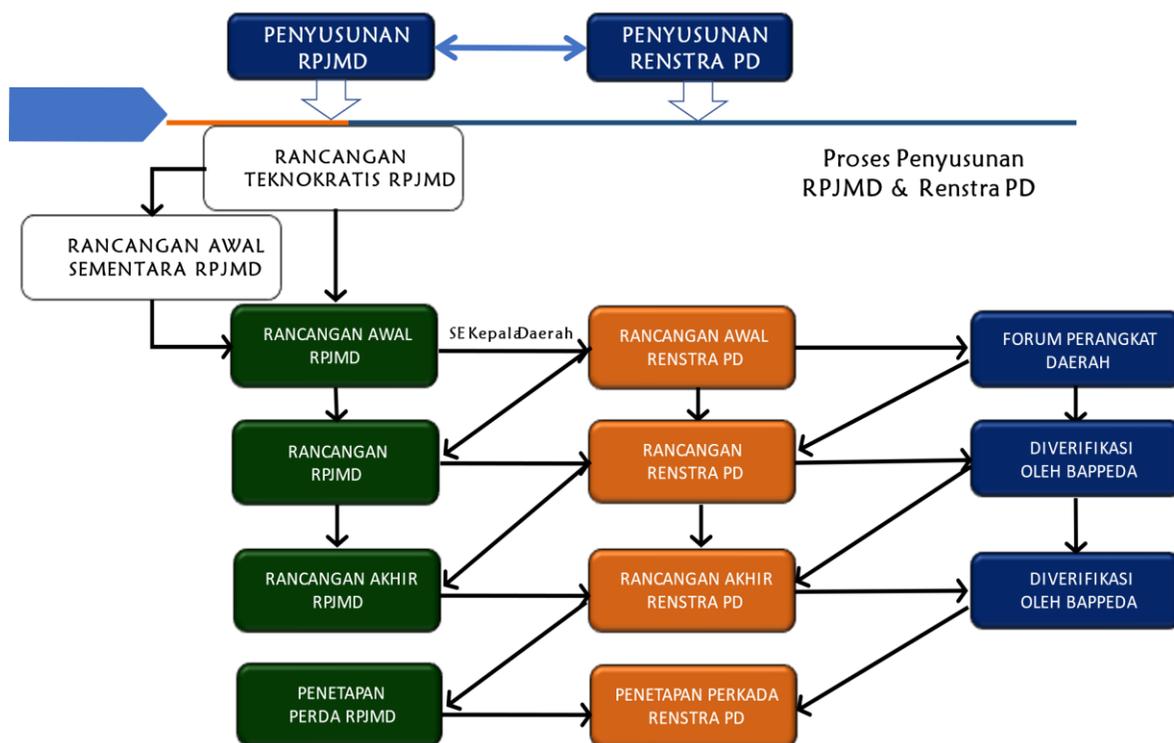
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026. Renstra ini mengorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada serta memuat tujuan dan sasaran serta prioritas kebijakan pemerintah daerah sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan acuan perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif, yang memuat gambaran pelayanan dinas, uraian capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir, isu dan permasalahan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan. Untuk itu, pembangunan bidang perikanan tahun 2021-2026 akan menjabarkan agenda-agenda pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan ketersediaan konsumsi ikan, serta perluasan kesempatan kerja.

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 No. tahun 2021);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
19. Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk :

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Perikanan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.
2. sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan yaitu tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan periode 2021 – 2026 ini adalah :

1. tersedianya dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kepala Dinas Perikanan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan.
2. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perikanan.
3. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perikanan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

4. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang lingkup Dinas Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN, memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu – isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan yang mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII. PENUTUP, memuat kaidah perubahan dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan. Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
3. Melaksanakan fungsi administrasi di lingkup Dinas Perikanan.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur organisasi Dinas Perikanan adalah :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Program.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.
- III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, meliputi :
 1. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
- IV. Bidang Pemberdayaan Usaha kecil Pembudidayaan ikan, meliputi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pembudi Daya Ikan.
 2. Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, meliputi :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan
- VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Secara umum Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyusun rencana kegiatan Dinas Perikanan sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- menyelenggarakan administrasi Dinas Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, dan

- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

II. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas.
- pengoordinasian penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi keuangan.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD).
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- pengoordinasian urusan pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

- pengoordinasian urusan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- pengoordinasian urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha dan kelembagaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan pendaftaran usaha pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- melakukan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil.
- melakukan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- Melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan kecil.
- melakukan pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam kabupaten.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

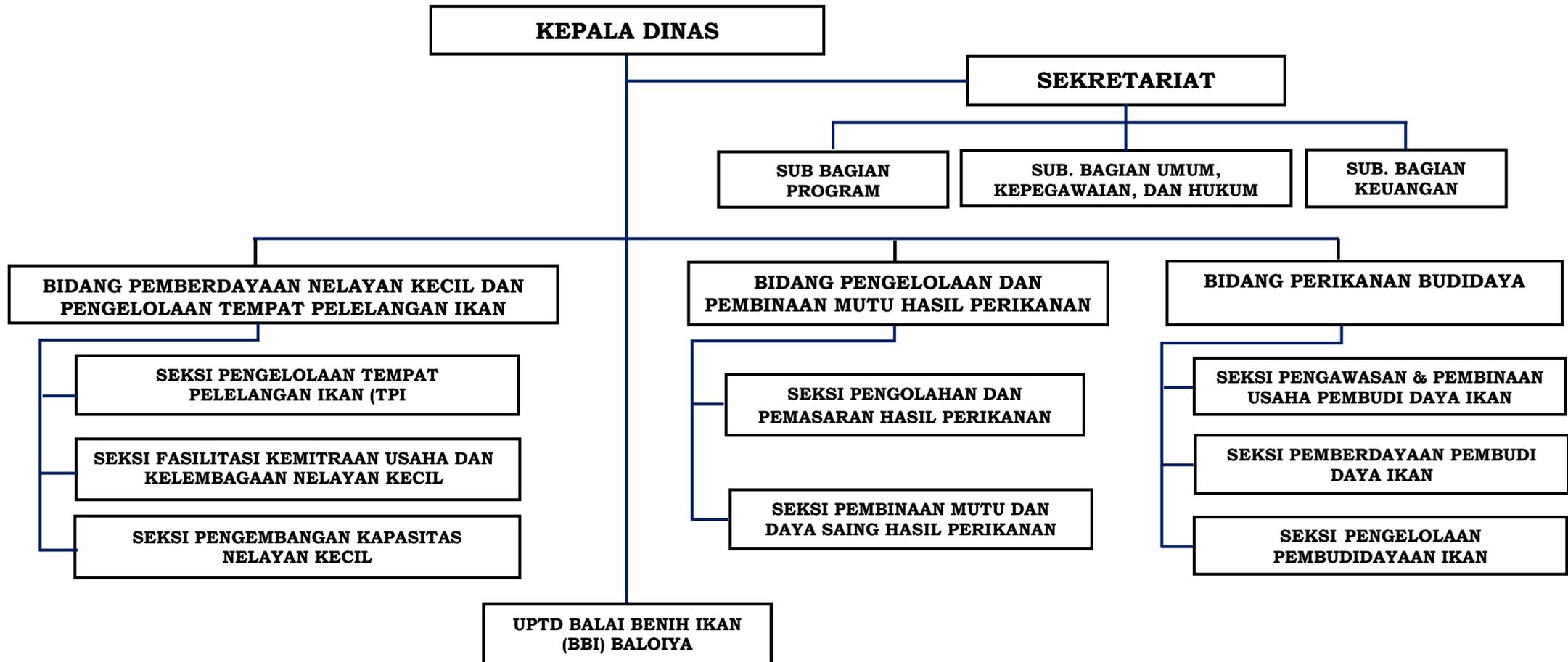
- melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dalam lingkup kewenangan kabupaten.
- melaksanakan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
- melaksanakan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- melaksanakan fasilitasi bahan verifikasi dan kajian untuk pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan

UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyediaan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan bina usaha hasil produksi perikanan.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020)



2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Perikanan sebanyak 46 orang. Adapun jumlah pegawai di Dinas Perikanan menurut golongan dan kepangkatan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Menurut Golongan

Pegawai Menurut Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I	-	-	-
Golongan II	3	-	3
Golongan III	20	19	39
Golongan IV	2	2	4
JUMLAH	25	21	46

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, 2020.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Menurut Jabatan

Pegawai Menurut Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	1	-	1
Eselon III	1	3	4
Eselon IV	6	7	13
Non Struktural (Staf)	17	8	25
JUMLAH	25	18	43

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, 2020.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	PEGAWAI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	DIII	S1	S2	S3	
A.	PEMEGANG ESELON						
1.	Eselon II	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	2	2	-	4
3.	Eselon IV	-	-	10	3	-	13
B.	NON ESELON						
4.	Non Struktural	5	2	18	-	-	25
5.	Kontrak	17	1	48	-	-	66
6.	Sukarela	-	1	1	-	-	2
	TOTAL	22	4	80	5	-	111

Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar pegawai pada lingkup Dinas Perikanan berada pada tingkat/golongan III dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2/S3). Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi sumberdaya aparatur di lingkup ini sudah memadai. Selain itu, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 66 orang yang sebagian besar juga berlatar belakang sarjana di bidang kelautan dan perikanan.

Jumlah UPTD yang terbentuk saat ini ada 1 unit yaitu UPTD BBI. aparatur yang ditempatkan di UPT tersebut juga masih sangat terbatas, dengan wilayah cakupan binaannya masih luas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana operasional yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Perikanan
Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak Berat
1.	Pabrik Es	Unit	9	2	4	3
2.	Cold Storage	Unit	2	2	-	-
3.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	2	1	1	
4.	Tambak	Ha	1	1	-	-
5.	Hatchry	Unit	1	1	-	-
5.	Gudang	Unit	-			
6.	Bangunan Pengawas	Unit				
7.	Bangunan Workshop	Unit	1	1	-	-
8.	Sarana Pengangkutan :					
	- Kapal Pengangkut					
	- Mobil Refrigerator	Unit	1			
	- Motor Roda Tiga	Unit	3			

Tabel 2.5
Sarana dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak Berat
1.	Tanah Bangunan :					
	- Perkantoran	Ha	1	√		
	- Tambak	Ha	1	√		
	- TPI	Ha	1	√		
	- BBI	Ha	1	√		
	- Pabrik Es	Ha	6	√		
	- Cold Storage	Ha	1	√		
2.	Bangunan Kantor :					
	- Gedung Perkantoran	Unit	8	√		
	- Konstruksi Pagar	Unit	1	√		
	- Kantor UPT	Unit	1	√		
	- Tempat Ibadah	Unit	1	√		
	- Koperasi	Unit	1	√		
	- Gedung Observasi	Unit	1	√		
	- Tempat Kerja Lain-lain	Unit	13	√		
3.	Sarana dan prasarana Produksi & P2HP :					
	- Kolam BBI	Kolam	12	4	4	4
	- Pabrik Es	Unit	9	3	3	3
	- TPI	Unit	2	1	0	1
	- Cold storage	Unit	2	2	0	0
4.	Peralatan Kantor :					
	- Meja Kerja	Unit	23	√		
	- Kursi	Unit	100	√		
	- Lemari (kayu)	Unit	6	√		
	- Brangkas	Unit	1	√		
	- Kursi Tamu	Unit	3	√		
	- Laptop + Komputer	Unit	47	√		
	- Printer	Unit	29	√		
	- Mesin Ketik	Unit		√		
	- Meja Rapat	Unit	2	√		
	- Kamera	Unit	1	√		
	- Scanner	Unit	2	√		
	- Infocus + Layar	Unit	2	√		
	- Sound system	Unit	1	√		
	- TV + AC	Unit	17	√		
5.	Kendaraan :					
	- Mobil Jabatan	Unit	1	√		
	- Mobil Dinas	Unit	4	√		
	- Motor Dinas	Unit	32	√		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, 2020.

Sarana dan prasarana perkantoran juga telah meningkat, dimana alat bantu kerja seperti komputer dan laptop telah tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendaraan operasional baik darat maupun laut juga telah memadai. Namun luasan gedung kantor yang tersedia tidak dapat lagi menampung jumlah staf yang ada, sehingga kinerja staf di kantor menjadi kurang efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan perangkat daerah disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terarah yang secara administrasi dapat memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Pencapaian kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran dan target renstra perangkat daerah periode sebelumnya berdasarkan indikator SPM, IKK, ataupun indikator MDG's. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode renstra tahun 2016-2020, diuraikan sebagai berikut :

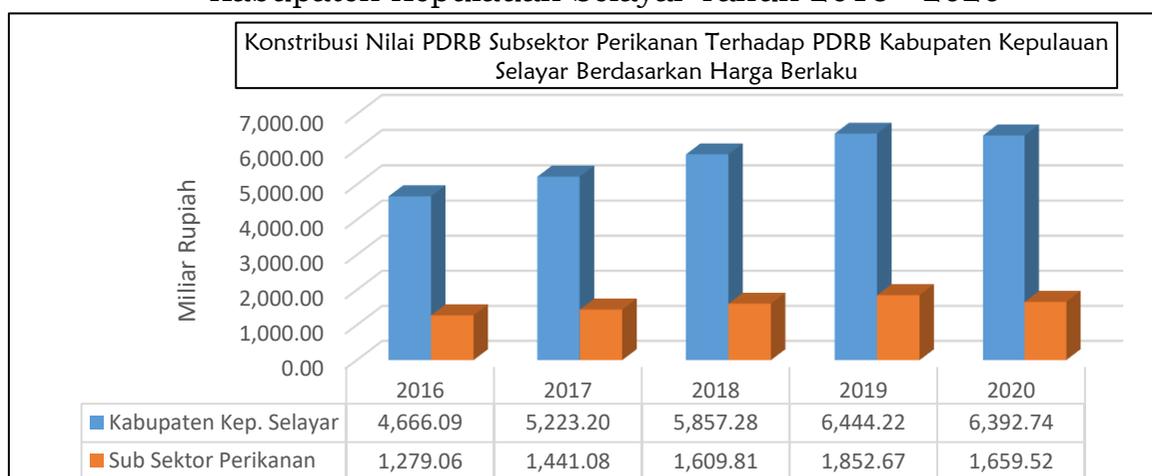
2.3.1 Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

Mengacu pada misi ke-3 RPJMD periode tahun 2016-2021, dengan Tujuan ke-6, yakni : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran yang selaras dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tujuan ke-6 tersebut berkaitan dengan 2 (dua) sasaran yaitu Berkurangnya penduduk miskin (S-8) dan Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9). Sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam revisi Renstra Tahun 2018-2021, memasukkan kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai indikator sasaran.

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada indikator kontribusi PDRB subsektor perikanan terus meningkat pada periode tahun 2016-2019, kemudian mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat wabah Covid-19. Berikut data capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada indikator capaian PDRB Subsektor Perikanan periode tahun 2016-2020.

Gambar 2.2

Capaian Kinerja Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020



Sumber : Data BPS Kab. Kep. Selayar, Tahun 2016–2020

Tabel 2.6
Perbandingan Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan Terhadap
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020
(Rp. Milyar)

Uraian	Kinerja Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020 (Rp. Milyar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar	4.666,09	5.223,20	5.857,28	6.444,23	6.392,74
Subsektor Perikanan	1.279,06	1.441,08	1.609,81	1.852,67	1.659,52
Persentase Kontribusi (%)	27.41	27.59	27.48	28.75	25.96

Sumber : Data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

2.3.2 Capaian Kinerja Produksi Perikanan

Peningkatan produksi perikanan adalah suatu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Capaian produksi perikanan berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel di bawah ini.

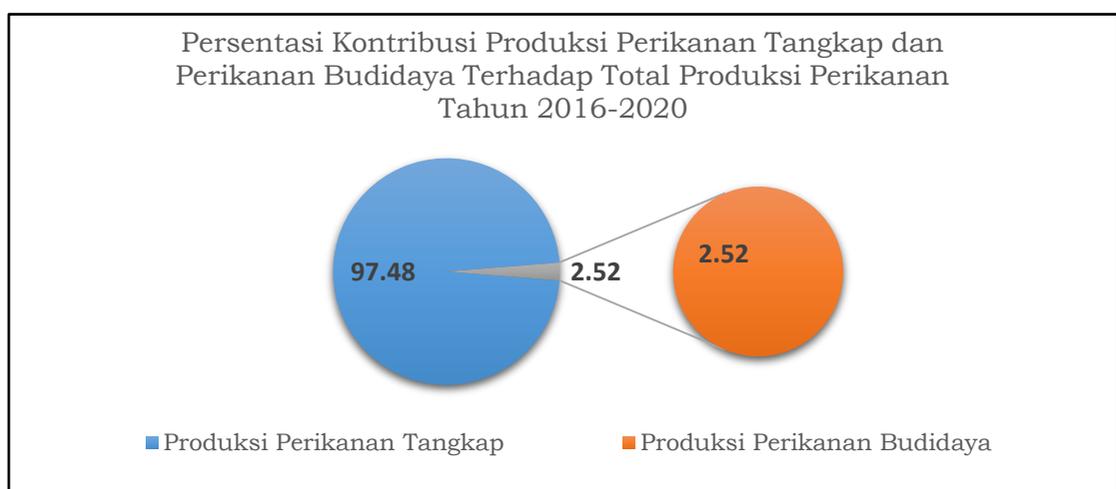
Tabel 2.7
Capaian Kinerja Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

Uraian Capaian Kinerja Produksi Perikanan	Periode Tahun 2016 – 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target Produksi Perikanan (Ton)	27.427,85	29.849,61	32.191,64	34.409,88	36.112,26
Realisasi Produksi Perikanan (Ton dan %) :					
Kontribusi Produksi Perikanan Tangkap (Ton & %)	24.092,60 (89,54 %)	20.152,20 (69,04 %)	21.592,50 (68,61 %)	28.268,30 (83,82 %)	18.729,20 (54,19 %)
Kontribusi Produksi Perikanan Budidaya (Ton & %)	465,30 (1,89 %)	456,20 (2,21 %)	493,02 (2,23 %)	573,12 (1,99 %)	837,36 (4,28 %)

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap capaian produksi perikanan selama periode tahun 2016-2020, hanya sebesar 73,04 % atau belum mencapai target. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh produksi perikanan tangkap dengan rata-rata 97,48 %, sementara produksi perikanan budidaya hanya menyumbang secara rata-rata 2,52 %, sebagaimana pada grafik berikut ini.

Gambar 2.3
Perbandingan Kontribusi Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Terhadap Total Produksi Perikanan



Secara umum permasalahan utama yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan antara lain :

1. Usaha perikanan masih didominasi skala kecil, yang terlihat pada kepemilikan sarpras produksi, teknologi, dan budaya kerja baik pada usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
2. Tingginya intensitas penjualan di atas kapal (produksi tangkapan tidak terdaratkan) atau biasa dikenal dengan istilah *transshipment*. Hal ini sering dipicu oleh belum adanya kawasan

pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan dan memenuhi seluruh kebutuhan pelaku usaha perikanan.

3. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, baik keterampilan, kelembagaan, maupun teknologi dalam usaha perikanan.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, sehingga investasi pada input peningkatan produksi berjalan lambat.

Tabel 2.8

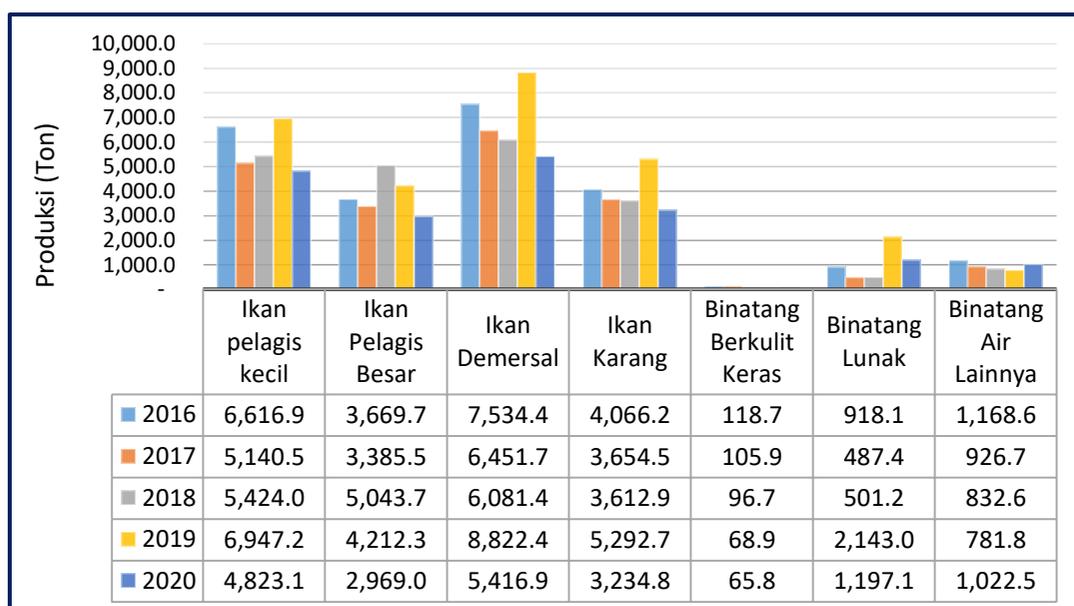
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2.656,8	3.062,0	3.279,31	4.193,4	2.778,4
2	Pasilambena	4.370,0	1.600,7	1.713,81	2.354,5	1.560,1
3	Pasimasunggu	2.129,6	1.147,5	1.228,81	2.182,6	1.446,1
4	Taka bonerate	5.486,5	4.429,4	4.743,91	6.460,9	4.280,6
5	Pasimasunggu Timur	1.032,3	823,1	881,41	954,2	632,2
6	Bontosikuyu	2.906,6	3.421,3	3.672,81	4275	2.832,4
7	Bontoharu	2.743,8	2.484,1	2.660,41	4.033,1	2.673,1
8	Benteng	231,9	167,7	179,41	185,1	122,7
9	Bontomanai	649,9	581,8	625,49	715,8	472,3
10	Bontomatene	1.293,6	1.989,5	2.130,61	2.289,6	1.517,8
11	Buki	591,6	445,1	476,51	624,1	413,5
Produksi perikanan (Ton)		24.092,6	20.152,2	21.592,5	28.268,3	18.729,2

Sumber : Data Statistik Perikanan DKP Kab. Kep. Selayar, Tahun 2020

Gambar 2.4

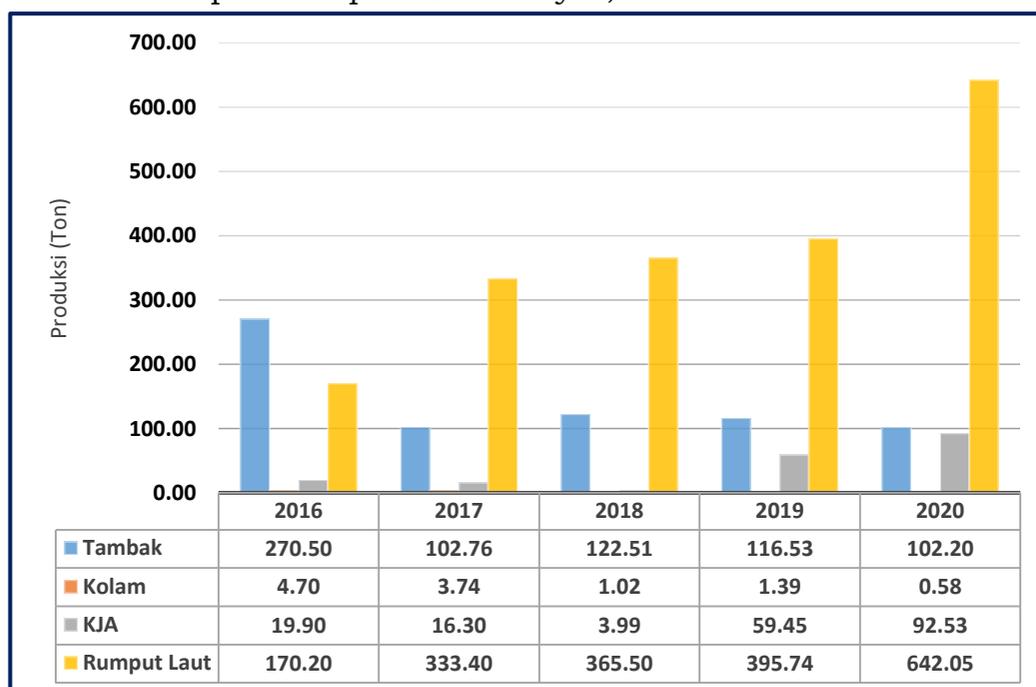
Grafik Capaian Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016 – 2020



Sumber : Statistik Perikanan DKP Kab. Kep. Selayar, Tahun 2020

Gambar 2.5

Capaian Produksi Perikanan Budidaya Menurut Wadah Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016 - 2020

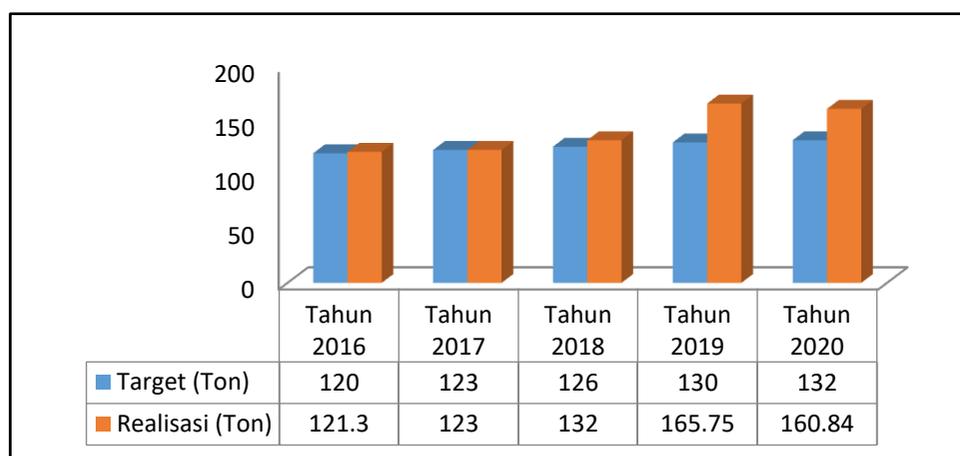


Sumber : Statistik Perikanan DKP Kab. Kep. Selayar, Tahun 2020

Sementara kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada capaian meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dapat dikategorikan sangat berhasil, yaitu sebesar 121,85 % atau mencapai 160,84 ton dari target 132 ton pada tahun 2020.

Gambar 2.6

Capaian Produk Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020



2.3.3 Capaian Kinerja Konsumsi Ikan

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap sasaran kinerja peningkatan konsumsi ikan selama periode tahun 2016-2020 juga mencapai keberhasilan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5 di bawah.

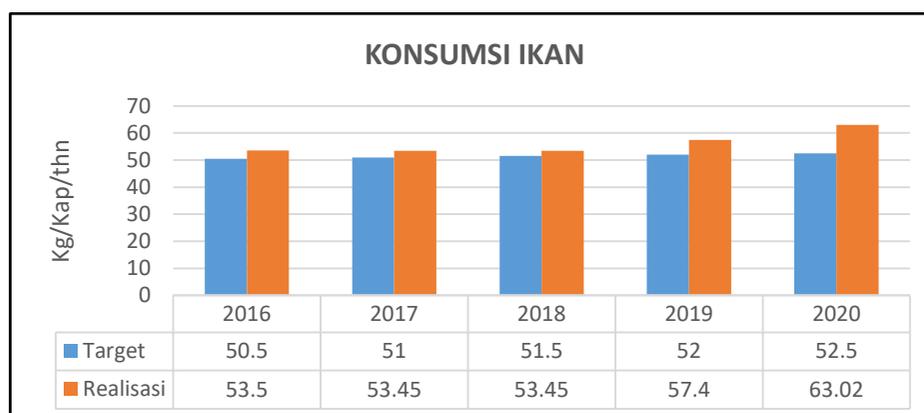
Pada Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016-2020 (Tabel 2.11) diuraikan bahwa realisasi capaian pada sasaran konsumsi ikan mencapai 120,73 % atau sebesar 63,02 kg/kapita dari target 52,5 kg/kapita pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Tersebarnya potensi perikanan dan tingginya produksi perikanan.

2. Budaya masyarakat Selayar terhadap konsumsi ikan yang cukup tinggi dan intensitas kegiatan GEMARIN.
3. Kurang tersedianya sumber protein dari hewan.

Gambar 2.7

Capaian Kinerja Terhadap Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020



2.3.4 Capaian Kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan diartikan sebagai jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, baik berupa bantuan sarana dan prasarana kenelayanan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Adapun kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait sasaran jumlah cakupan bina kelompok nelayan selama periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	7	3	4	7
2	Pasilambena	0	0	8	0	1
3	Pasimasunggu	1	0	0	5	8
4	Taka bonerate	0	7	21	21	11
5	Pasimasunggu Timur	0	1	15	5	6
6	Bontosikuyu	4	13	33	27	15
7	Bontoharu	5	15	3	27	12
8	Benteng	0	1	4	3	3
9	Bontomanai	0	3	3	4	6
10	Bontomatene	3	13	37	31	7
11	Buki	2	6	11	9	6
Total		15	66	138	136	82

Sumber : DKP Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2020

2.3.5 Capaian Kinerja Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah persentasi produksi perikanan yang dihasilkan oleh seluruh kelompok nelayan terhadap total produksi perikanan tangkap. Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja sasaran produksi perikanan kelompok nelayan selama periode tahun 2016-2020 juga mengalami keberhasilan.

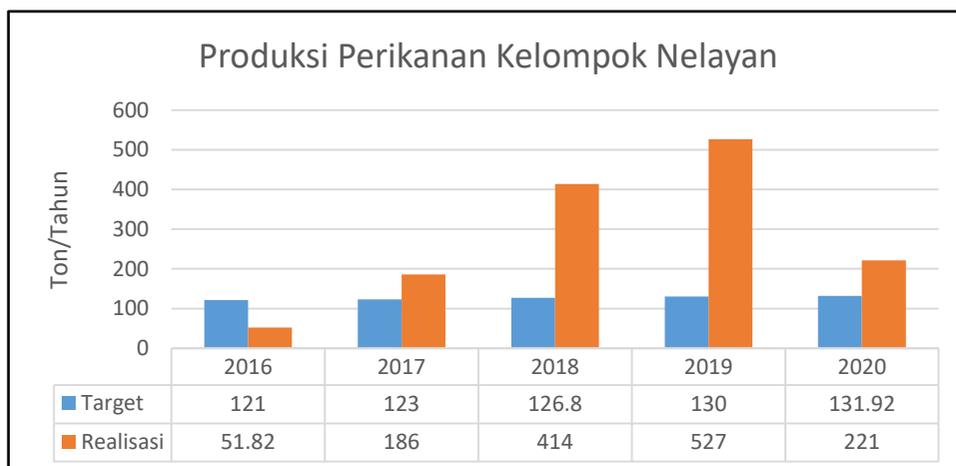
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran produksi perikanan kelompok nelayan tersebut mencapai 167,53 % pada tahun 2020 yaitu 221 ton dari target 131,92 ton pada tahun yang sama. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun yang sama, maka persentasi produksi kelompok nelayan terhadap produksi perikanan tangkap masih sangat rendah, yaitu hanya 1,21 % dari volume produksi perikanan tangkap sebesar 18.729,20 ton pada tahun 2020.

Masih rendahnya persentasi produksi kelompok nelayan terhadap total produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Masih rendahnya kohesifitas usaha penangkapan dalam kelompok yang ditandai dengan usaha sendiri-sendiri dengan sarana dan alat tangkap yang berbeda-beda serta belum terikat dalam unit usaha penangkapan yang sama.
2. Masih kurangnya pendampingan KUB

Gambar 2.8

Capaian Kinerja Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

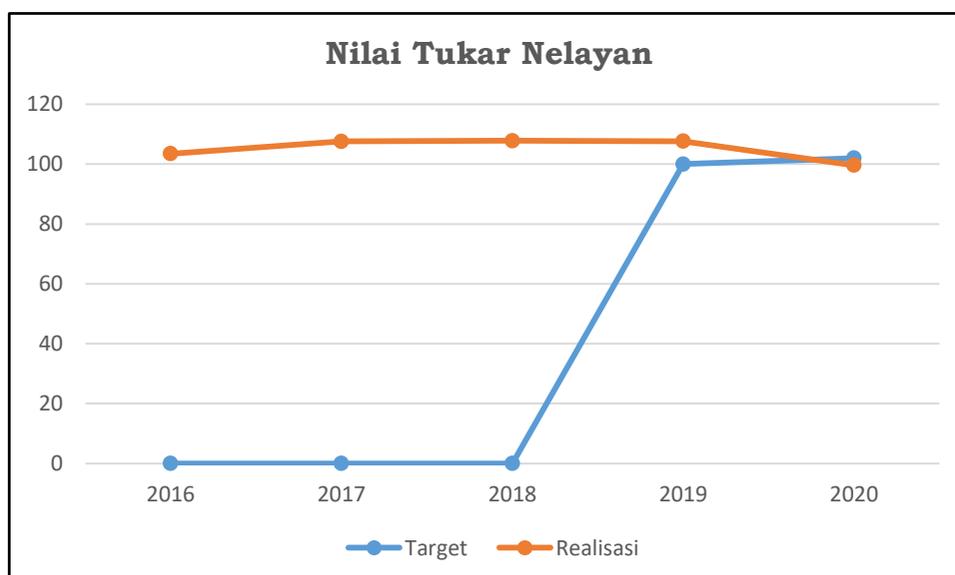


2.3.6 Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jadi NTN menunjukkan rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Gambar 2.9

Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2016-2020



Pada gambar 2.9 terlihat bahwa NTN tahun 2016-2018 belum memiliki target dan kemudian dilakukan revisi atau perubahan Renstra pada tahun 2018. Meskipun pengukuran kinerja ini belum bisa dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, namun mengacu pada data sekunder (BPS Sulawesi Selatan), bahwa selama periode tahun 2016-2020 terlihat bahwa NTN di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan sampai tahun 2019 dan mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

2.3.7 Capaian Kinerja Program Strategis Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Untuk mewujudkan pembangunan KIPT dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu (1) memaksimalkan pembangunan dan pengelolaan kawasan perikanan yang sudah ada seperti TPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan ikan lainnya, dan (2) membangun Kawasan Perikanan baru pada lokasi yang lebih dekat dengan area penangkapan yang mengintegrasikan seluruh aspek bisnis perikanan mulai penangkapan hingga pengolahan dan distribusi produk yang diharapkan akan memicu efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan.

Pendekatan pertama pembangunan KIPT dilakukan dengan melengkapi berbagai infrastruktur perikanan pada TPI Bonehalang

dan sentra/subsentra pendaratan ikan kemudian membangun kerjasama pengelolaan sarana yang telah disediakan.

Sedangkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang baru, dilaksanakan dengan membagi pada 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap Penyediaan Dokumen Perencanaan Kawasan KIPT.
- b. Tahap Pengadaan/Pembebasan lahan Kawasan KIPT.
- c. Tahap Pembangunan Infrastruktur KIPT.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Pembangunan KIPT Hangkoang

No	Uraian Tahapan	Keterangan
I.	Tahap Penyediaan Dokumen Perencanaan Kawasan KIPT	
1.	Dokumen Studi kelayakan lokasi KIPT	Sudah Tersedia
2.	Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT	Sudah Tersedia
3.	Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang wilayah (RZWP3K, Rancangan Perda RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)	Terakomodir dalam 3 regulasi tata ruang
4.	Dokumen Perencanaan Bisnis KIPT	Belum Tersedia
5.	AMDAL Kawasan	Belum Tersedia
<p>Catatan : Pemda Selayar telah menyediakan anggaran pada APBD TA. 2020 untuk Penyediaan Dokumen Bisnisplan dan AMDAL KIPT, tetapi tidak terealisasi karena anggarannya difokuskan akibat dampak pandemi Covid-19</p>		
II.	Penyediaan Lahan Kawasan KIPT	
1.	Penetapan lokasi KIPT oleh Bupati	SK Bupati No. 590/XI/2018
2.	Dokumen Pengadaan Lahan KIPT	Ada
3.	Pengadaan/Pembebasan Lahan Kawasan KIPT	Belum Ada
<p>Catatan : Pemda Selayar telah menyediakan anggaran pada APBD TA. 2019 dan TA. 2020 untuk pembebasan lahan KIPT Hangkoang tetapi tidak terealisasi karena dianggap bahwa kegiatan pembebasan lahan bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota</p>		
III.	Tahap Pembangunan Infrastruktur KIPT Hangkoang	
1.	Pembangunan fasilitas Pokok	Belum Ada
2.	Pembangunan fasilitas Fungsional	Belum Ada
3.	Pembangunan Fasilitas Penunjang	Belum Ada

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ...					Realisasi Capaian Kinerja Tahun ...					Rasio Capaian pada Tahun...				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Produksi Perikanan (Ton)			27.427,85	29.849,61	32.191,64	34.409,88	36.112,26	24.558,9	20.608,4	22.086,52	28.842,42	19.566,56	89,54	69,04	68,61	83,82	54,19
a	Produksi Perikanan Tangkap	✓		26.598,77	28.992,66	31.312,07	33.503,92	35.179,12	24.092,6	20.152,2	21.592,50	28.268,30	18.729,20	90,58	69,51	68,96	84,37	53,61
b	Produksi Perikanan Budidaya			829,08	853,95	879,57	905,96	933,14	465,3	456,2	493,02	573,12	837,36	56,12	53,42	56,05	63,26	89,74
2.	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	✓		50,5	51	51,5	52	52,5	53,45	53,45	53,45	57,4	63,02	105,84	104,80	103,79	110,39	121,19
3.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan		✓	165	170	175	180	185	40	Na	140	148	89	24,24	0	80	82,22	48,11
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)		✓	121	123	126,8	130	131,92	51,82	186	414	527	221	43,18	151,34	328,59	405,67	167,53
5.	Proporsi Tangkapan Ikan yg Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman		✓	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Luas Perairan Teritorial		✓	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09
7.	Nilai Tukar Nelayan		✓	n/a	n/a	n/a	≥ 100	≥ 102	103,48	107,57	107,83	107,62	99,64	103,48	107,57	107,83	107,62	99,64

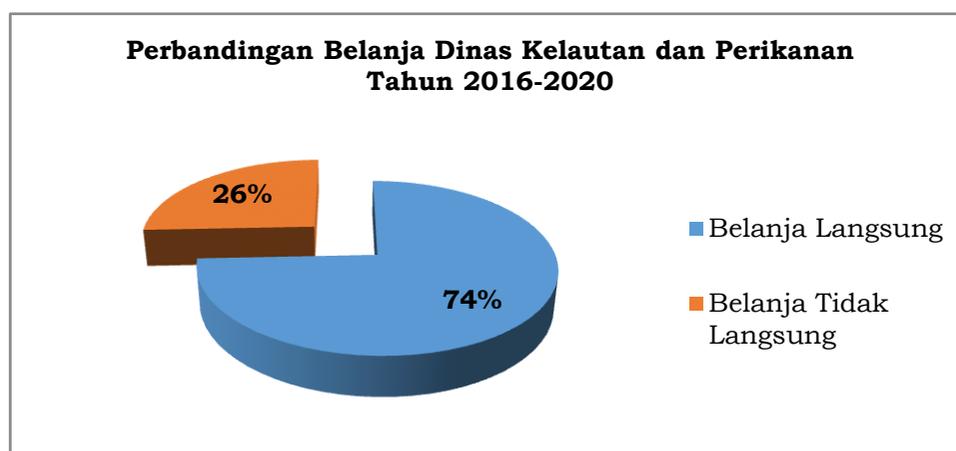
2.3.8 Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016-2020

Sedangkan sumber pendanaan dalam rangka pencapaian target Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2020, selain bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan persentasi yang masih didominasi oleh APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah anggaran mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 90,32 % atau rata-rata kenaikan anggaran sebesar (0,10), dengan realisasi pendanaan rata-rata mencapai 92,60 %. Sedangkan struktur belanja berdasarkan pendanaan terdiri atas belanja langsung dengan rata-rata 74,35 % dan 25,65 % untuk belanja tidak langsung. Perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.10 di bawah ini.

Gambar 2.10

Komposisi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020



Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2016-2020 diuraikan sebagaimana pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2016-2020

Uraian		Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 1.000)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke - (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	PENDAPATAN DAERAH																	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75,500,000	164,500,000	129,500,000	110,000,000	223,078,000	48,819,000	34,432,000	39,794,000	46,569,000	43,945,450	64.66	20.93	30.73	42.34	19.70	1.03	-0.06
	- Retribusi Daerah	75,500,000	164,500,000	129,500,000	110,000,000	223,078,000	48,819,000	34,432,000	39,794,000	46,569,000	43,945,450	64.66	20.93	30.73	42.34	19.70	0.46	3.85
B	BELANJA DAERAH	23,071,286,350	13,274,221,374	18,128,922,000	14,840,942,680	12,660,275,124	22,084,852,078	12,661,162,140	15,233,502,912	13,875,363,173	11,950,379,240	95.72	95.38	84.03	93.49	94.39	(0.10)	4.98
1	Belanja tidak Langsung	3,475,050,000	4,645,072,000	3,814,994,000	3,907,041,000	3,902,950,921	3,120,464,451	4,177,532,603	3,642,734,444	3,822,274,859	3,667,965,946	89.8	89.93	95.48	97.83	93.98	0.05	-3.15
2	Belanja Langsung	19,596,236,350	8,629,149,374	14,313,928,000	10,933,901,680	8,757,324,203	18,964,387,627	8,483,629,537	11,590,768,468	10,053,088,314	8,282,413,294	96.78	98.31	80.98	91.94	94.58	(0.08)	8.99
	- Belanja Barang Jasa	10,606,964,950	7,917,880,224	13,927,108,000	10,367,885,280	8,162,059,203	10,535,942,877	7,777,639,537	11,237,490,668	9,528,244,514	7,721,963,294	99.33	98.23	80.69	91.90	94.61	0.01	10.98
	- Belanja Modal	8,989,271,400	711,269,150	386,820,000	566,016,400	595,265,000	8,428,444,750	705,990,000	353,277,800	524,843,800	560,450,000	93.76	99.26	91.33	92.73	94.15	(0.22)	-12.74

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pelayanan

Memperhatikan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2020 tersebut di atas, dapat diidentifikasi adanya berbagai tantangan pelayanan oleh Dinas Perikanan ke depan, antara lain :

1. Masih rendahnya produksi perikanan dan nilai produksi.
2. Usaha perikanan masih didominasi skala kecil, yang terlihat pada kepemilikan sarpras produksi, teknologi, dan budaya kerja baik pada usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
3. Masih tingginya intensitas penjualan di atas kapal (*transshipment*).
4. Belum adanya kawasan pendaratan ikan dengan infrastruktur yang memadai dalam mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan.
5. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, baik keterampilan, kelembagaan, maupun teknologi.
6. Rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, sehingga investasi pada input peningkatan produksi berjalan lambat.
7. Rendahnya kohesifitas usaha penangkapan dalam kelompok yang ditandai dengan usaha sendiri-sendiri dengan sarana dan alat tangkap yang berbeda-beda serta belum terikat dalam unit usaha penangkapan yang sama.

8. Rendahnya budaya dan minat berkelompok serta belum optimalnya pendampingan kelembagaan kelompok perikanan.
9. Tingginya aktifitas penangkapan ikan yang merusak sumberdaya perikanan yang berdampak terhadap keberlanjutan sumberdaya.
10. Minimnya infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan baik pengelolaan produksi (fasilitas pendaratan, depot BBM, air, pabrik es dll) dan sarana pengolahan hasil perikanan (UPI), serta sarana pemasaran hasil perikanan (TPI dan sistem rantai dingin).

2.4.2 Peluang Pelayanan

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dioptimalkan antara lain :

1. Masih tingginya potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai modal pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Besarnya jumlah masyarakat pelaku usaha perikanan yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan dan Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) sebagai salah satu strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Tingginya permintaan pasar global terhadap produk perikanan.
5. Adanya sarana transportasi barang dalam jaringan Tol Laut yang menghubungkan KTI dengan Pulau Jawa.
6. Tingginya minat investasi oleh swasta dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.13

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini (Tahun 2020)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
<p>Peningkatan Produksi Perikanan Nasional dari 26,46 juta ton (tahun 2020) menjadi 32.75 juta ton (tahun 2024) (Renstra KKP 2020-2024)</p>	<p>Produksi perikanan: (19.698,56 ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Tangkap (18.861,20 ton) - Perikanan budidaya (837,36 ton) 	<p>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi perikanan dan nilai produksi. 2. Usaha perikanan masih didominasi skala kecil baik pada usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. 3. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, baik keterampilan, kelembagaan, maupun teknologi. 4. Rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, sehingga investasi pada input peningkatan produksi berjalan lambat. 5. Rendahnya kohesifitas usaha penangkapan dalam kelompok yang ditandai dengan usaha sendiri-sendiri dengan sarana dan alat tangkap yang berbeda-beda serta belum terikat dalam unit usaha penangkapan yang sama. 6. Rendahnya budaya dan minat berkelompok serta belum optimalnya pendampingan kelembagaan kelompok perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya intensitas penjualan di atas kapal (<i>transshipment</i>). 2. Belum adanya kawasan pendaratan ikan dan minimnya infrastruktur yang memadai dalam mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan. 3. Tingginya aktifitas penangkapan ikan yang merusak sumberdaya perikanan yang berdampak terhadap keberlanjutan sumberdaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur 2. Terbatasnya kewenangan dan anggaran perangkat daerah dalam penyediaan fasilitas perikanan dan sarpras produksi. 3. Geografis daerah yang berciri kepulauan dalam jangkauan pelayanan kepada stakeholder perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Selayar dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Meskipun berdasarkan realisasi capaian kinerja layanan yang selama lima tahun terakhir telah mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan. Pengelolaan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

MASALAH POKOK		MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap Masih Rendahnya Produksi dan Produktifitas Usaha Perikanan Tangkap	Menurunnya Daya Dukung Lingkungan Sumber Daya Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta masih maraknya Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing 2. Masih lemahnya sistem pendataan & kurangnya data kondisi stok SDI, hasil tangkapan & tingkat eksploitasi sumber daya ikan 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi pengelolaan sumber daya ikan antar sektor dan antar instansi terkait.
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur armada penangkapan ikan masih didominasi oleh armada skala kecil (dibawah 5GT) 2. Ketersediaan sarana pokok dan infrastruktur pendukung sektor kelautan dan perikanan masih terbatas 3. Tidak tersedianya infrastruktur berbasis kawasan yang berfungsi sebagai depot logistik perikanan. 4. Integrasi dan konektivitas antar sentra (produksi) nelayan belum optimal, termasuk sistem data dan informasi. 5. Ketersediaan fasilitas TPI dan PPI yang terbatas sehingga TPI Bonehalang dan TPI Kayuadi belum dapat dimanfaatkan dengan baik.
		Rendahnya Skala Usaha dan Kelembagaan Usaha Kenelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan nelayan yang masih tinggi 2. Skala usaha dan kemandirian kelembagaan usaha nelayan yang masih rendah 3. Rendahnya akses nelayan terhadap permodalan, teknologi dan pasar. 4. Rantai tata niaga perikanan yang masih panjang akibat ketersebaran pulau-pulau sebagai basis penangkapan dengan konsumen 5. Masih minimnya perlindungan sosial bagi nelayan.

2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya Masih Rendahnya Produksi dan Produktifitas Usaha Perikanan Budidaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan tata ruang lahan dan air. 2. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan, penggunaan obat-obatan dan pengendalian lingkungan. 3. Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, seperti saluran irigasi (primer, sekunder, tersier), jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak).
		Pengelolaan Pakan, Obat-obatan, dan Perbenihan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan pabrik yang mahal. 2. Kurangnya pemanfaatan dan penyediaan pakan alami sebagai alternatif pakan buatan. 3. Belum optimalnya peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun logistik perbenihan dan penerapan teknologi pembenihan.
		Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM pembudidaya relatif rendah dan skala usaha masih tradisional serta belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi. 2. Kelembagaan pembudidaya ikan belum terkelola dengan baik dan belum berorientasi pasar. 3. Akses permodalan dan perlindungan usaha budidaya skala kecil masih terbatas. 4. Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang
		Rendahnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di kawasan budidaya. 2. Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar. Terutama belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB masih rendah.

3.	<p>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Masih Rendahnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan</p>	<p>Produksi, Niai Tambah, dan Mutu Produk Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Relatif Rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya investasi swasta dalam pengolahan dan pemasaran perikanan 2. Terbatasnya ragam dan diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan yang bernilai tambah. 3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur penanganan mutu dan sistem rantai dingin pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di sentra-sentra produksi perikanan. 4. Usaha Pengolah dan Pemasar hasil perikanan masih berskala mikro dengan kesadaran berkelompok yang sangat rendah. 5. Terbatasnya informasi yang tepat, akurat, dan aktual tentang ketersediaan produk kelautan dan perikanan. 6. Terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 7. Belum terintegrasinya usaha produksi, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan dalam sistem konektivitas hulu-hilir terutama berbasis kawasan perikanan. 8. Terbatasnya ketersediaan bahan baku unit pengolahan ikan yang menyebabkan masih rendahnya tingkat utilitas UPI. 9. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap standarisasi mutu produk olahan hasil perikanan serta kemampuan SDM yang sangat terbatas. 10. Terbatasnya kompetensi dan jumlah tenaga kerja di bidang pasca panen dan pemasaran, serta jumlah Pembina mutu dan Pembina pasar hasil kelautan dan perikanan. 11. Biaya logistik dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang masih sangat mahal.
----	--	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih. Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Kepala Daerah terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) pokok visi yakni “Bandar Maritime” dan “Kawasan Timur Indonesia”. Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. **Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2022 – 2026, merumuskan dan menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun uraian ke-6 (keenam) misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan sebagai berikut :

Misi Ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Misi ke-1 RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1), dengan 3 (tiga) indikator masing-masing : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, 2. Nilai SAKIP Daerah, dan 3. Opini BPK.

Misi Ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Misi ke-2 RPJMD ini, memuat 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan (T-2) dengan 2 indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Rasio Gini. Tujuan ke-2 memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan (S-2) dengan indikator Indeks Desa Membangun.

- b. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal (T-3) dengan 1 indikator yaitu PDRB / Kapita. Tujuan ke-3 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan (S-3) dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Misi Ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Misi ke-3 RPJMD memuat 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (T-4) dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan ke-4 dari RPJMD ini memuat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, masing-masing :

- a. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (S-4) dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Pendidikan.
- b. Maningkatnya Daya Beli Masyarakat (S-5) dengan indikator yaitu Pengeluaran Perkapita.

Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Misi ke-4 RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-5) dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tujuan ke-5 ini juga memuat 3 (tiga) sasaran masing-masing :

- a. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6) dengan indikator yaitu Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.
- b. Meningkatnya usaha pariwisata (S-7) dengan indikator yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
- c. Meningkatnya Usaha Kepelabuhanan (S-8) dengan indikator Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB

Misi ke-5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ke-5 dari RPJMD ini, memuat 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan aktualisasi (T-6) dengan indikator Pembangunan Kebudayaan. Tujuan ke-6 memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9) dengan indikator Indeks Ketahanan Sosial.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan (T-7) dengan 1 indikator yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Tujuan ke-7 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S-10) dengan indikator Angka Kriminalitas.

Misi ke-6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-6 dari RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup (T-8) dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Tujuan ke-8 ini memuat 1 (satu) sasaran yaitu Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan (S-11) dengan 3 (satu) indikator yaitu 1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara, dan 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Dalam RJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 4 (empat) program prioritas dalam pembangunan daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah tersebut sebagai pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

- c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
 - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
 - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
 - d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
 - e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
 - f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
 - g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada pembangunan KIPT di tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa ;

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri perikanan.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan

ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

Untuk lebih jelasnya telaahan tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkaitan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
	Indikator Tujuan ke-1 : Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Program : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Pengelolaan Kinerja Reformasi Birokrasi belum optimal 2. Manajemen SAKIP belum terkelola dengan baik 3. Pengelolaan Asset dan PAD belum maksimal	1. Masih rendahnya kompetensi dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Perikanan 2. Dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan SAKIP belum baik 3. Masih banyaknya rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan asset dan temuan administrasi lainnya	1. Lahirnya berbagai kebijakan terkait Reformasi Birokrasi & Pengembangan Kapasita Aparatur 2. Terbukanya akses terhadap teknologi informasi 3. Manajemen dan budaya organisasi
2.	Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
	Indikator Tujuan ke-3 : PDRB Perkapita - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah desa pesisir dan pulau-pulau kecil.	1. Kepemilikan sarpras produksi perikanan yang masih bersifat tradisional 2. Masih rendahnya kesadaran berkelompok dan rendahnya kemandirian kelompok perikanan	1. Adanya kebijakan penganggaran terhadap bantuan Sarpras produksi berbasis kelompok usaha perikanan 2. Intensitas pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

3. Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman			
<p>Indikator Tujuan ke-5 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	<p>Masih Rendah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kompetensi SDM perikanan • Menurunnya daya dukung lingkungan Sumber Daya Ikan (laut, pesisir, darat) • Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha Produksi • Rendahnya Skala Usaha dan Kelembagaan Usaha • Terbatasnya Infrastruktur pendaratan Ikan • Rantai tata niaga produk perikanan yang panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM & Kelembagaan Usaha Budidaya Rendah • Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan & Kesehatan ikan • Belum Optimalnya Pengelolaan Pakan, Obat-obatan, dan Perbenihan Ikan • Rendahnya Penerapan Standarisasi & Sertifikasi Perikanan Budidaya
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan • Masih Penerapan Standarisasi Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan sarana rantai dingin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar global dan regional sangat terbuka untuk konsumsi protein dari produk ikan • Kebijakan Program Strategis : KIPT • Minat Investasi Swasta pada sektor perikanan cukup tinggi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Renstra KKP Tahun 2020-2024 mengacu pada Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, KKP menetapkan 9 (Sembilan) Tujuan dan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis (SS). Adapun ke-9 sasaran strategis (SS) pada Renstra KKP Tahun 2020-2024, terdapat 3 (tiga) sasaran yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja, yaitu : 1). pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024.

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja yaitu : kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan 4 indikator kinerja, yaitu : 1). produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024; 2). produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 3 (tiga) major project terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
3. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan (Fish Market) Bertaraf Internasional

Berdasarkan uraian umum terhadap Renstra KKP 2020-2024, maka faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Dinas Perikanan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra KKP Tahun 2020 – 2024 dan Faktor Penghambat serta Pendorong

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<p>(SS-2) Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat</p> <p>Indikator : Pertumbuhan PDB Perikanan dari 7,9% (thn 2020) menjadi 8,71% (thn 2024).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan nilai produksi perikanan serta produk olahan belum optimal 2. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah 3. Investasi swasta pada usaha perikanan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendukung produksi dan sarana dan teknologi pengolahan masih terbatas 2. Aspek pasar, SDM, Prasarana dan teknologi yang belum memadai 3. Ketersediaan infrastruktur pengolahan perikanan belum tersedia & belum operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SD Kelautan dan Perikanan sangat besar 2. Kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk perikanan sangat besar 3. Terbuka akses pasar perikanan yang sangat terbuka 4. Minat investasi swasta yang tinggi 5. Kebijakan dan dukungan anggaran
2.	<p>(SS-4) Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat</p> <p>Indikator : Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, minimal 1.500 per tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya cakupan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam bentuk korporasi 2. Rendahnya kesadaran berkelompok dan rendahnya kemandirian kelompok perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan penganggaran terhadap bantuan Sarpras produksi kepada kelompok usaha perikanan 2. Pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

3.	<p>(SS-7) Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024; 2. Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Perikanan Tangkap relative masih rendah 2. Produksi Perikanan Budidaya relatif masih rendah 3. Produksi garam rakyat masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kompetensi SDM perikanan 2. Menurunnya daya dukung lingkungan Sumber Daya Ikan (laut, pesisir, darat) 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha Produksi 4. Rendahnya produktifitas produksi dari kelompok usaha perikanan. 5. Tingginya intensitas <i>transshipment</i> 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada sentra-sentra pendaratan ikan 7. Banyaknya lahan tambak garam yang tidak berproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya potensi perikanan tangkap. 2. Arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah terhadap penyediaan sarpras produksi perikanan 3. Arahan pembangunan infrastruktur pada KIPT dan Sentra-sentra pendaratan ikan 4. Intensitas kegiatan terhadap peningkatan kapasitas SDM dan sarpras perikanan 5. Kerjasama stakeholder untuk penanggulangan <i>destructive fishing</i> dan <i>illegal fishing</i> 6. Pembinaan dan pendampingan pada KUGAR
----	--	---	--	---

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tugas dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang termuat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018-2023 yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Adapun misi yang diamanahkan adalah Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Mengacu pada misi tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dalam Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023. Adapun ke-5 sasaran strategis (SS) pada Renstra DKP Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terdapat 3 (tiga) sasaran yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- SS-1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi, dengan 2 (dua) indikator, yaitu (1) Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%), yakni sebesar 8.4 % pada tahun 2019 menjadi 5.6 % pada tahun 2013; dan (2) Produksi Perikanan (ton), yaitu sebesar 4.061.326,7 ton pada tahun 2019 menjadi 4.249.058,3 ton pada tahun 2013.

- SS-2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan, dengan indikator Konsumsi Ikan (kg/Kap/th), yakni sebesar 64,70 pada tahun 2019 menjadi 65.9 pada tahun 2013.
- SS-3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan indikator Nilai Tukar Nelayan yakni sebesar 107 pada tahun 2019 menjadi 103.63 pada tahun 2023.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dan Faktor Penghambat serta Pendorong

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP Propinsi Sul-Sel Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<p>(SS-1) Meningkatnya Produksi Perikanan Dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Perikanan</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%), yakni sebesar 8.4 % pada tahun 2019 menjadi 5.6 % pada tahun 2013; dan</p> <p>2. Produksi Perikanan (ton), yaitu sebesar 4.061.326,7 ton pada tahun 2019 menjadi 4.249.058,3 ton pada tahun 2013.</p>	<p>1. Nilai produksi perikanan serta produk olahan belum optimal</p> <p>2. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah</p> <p>3. Investasi swasta pada usaha perikanan masih rendah</p> <p>4. Volume Produksi perikanan relative masih rendah</p> <p>5. Volumen produksi hasil olahan hasil masih rendah dan belum berdaya saing</p> <p>6. Usaha perikanan masih didominasi pada skala usaha kecil dan bersifat tradisional</p>	<p>1. Sarana dan prasarana pendukung produksi dan sarana dan teknologi pengolahan termasuk sarpras pada sentra-sentra pendaratan ikan masih terbatas</p> <p>2. Ketersediaan infrastruktur pengolahan perikanan belum tersedia & belum operasional</p> <p>3. Rendahnya Kompetensi SDM perikanan</p> <p>4. Menurunnya daya dukung lingkungan Sumber Daya Ikan (laut, pesisir, darat)</p> <p>5. Tingginya intensitas <i>transshipment</i></p> <p>6. Kemampuan pelaku usaha pada aspek pasar, SDM, Prasarana dan teknologi yang belum memadai</p>	<p>1. Potensi SD Kelautan dan Perikanan sangat besar</p> <p>2. Besarnya permintaan global terhadap produk perikanan</p> <p>3. Akses pasar perikanan yang terbuka</p> <p>4. Minat investasi swasta yang tinggi</p> <p>5. Arah pembangunan infrastruktur pada KIPT dan Sentra-sentra pendaratan ikan</p> <p>6. Intensitas kegiatan terhadap peningkatan kapasitas SDM dan sarpras perikanan</p> <p>7. Intensitas kerjasama stakeholder untuk penanggulangan <i>DF dan IF</i></p>

2.	<p>(SS-2) Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p> <p>Indikator : Konsumsi Ikan (kg/Kap/th), yakni sebesar 64,70 pada tahun 2019 menjadi 65.9 pada tahun 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Logistik ikan belum optimal 2. Jaminan keamanan mutu ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersebarnya pendaratan produksi perikanan 2. Belum tersedianya dan belum meratanya sarana penggudangan dan pengolahan ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarpras Logistik dan SDM. 2. Budaya Konsumsi ikan Masyarakat yang tinggi 3. Fasilitasi, pembinaan dan promosi produk
3.	<p>(SS-3) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan</p> <p>Indikator : Nilai Tukar Nelayan yakni sebesar 107 pada tahun 2019 menjadi 103.63 pada tahun 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks yang dikeluarkan nelayan cukup tinggi 2. Pendataan Nilai Tukar pelaku usaha masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah 2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing 3. Pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SD Kelautan dan Perikanan sangat besar 2. Kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk perikanan sangat besar 3. Terbuka akses teknologi produksi dan pengolahan hasil perikanan 4. Subsidi dan sarpras produksi yang lebih efisien dan ekonomis 5. Kebijakan dan dukungan anggaran

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata.
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional.
- c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 - 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
- b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan
- c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rancangan pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), di Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini adalah ibukota kecamatan

yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Sementara berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Kawasan perikanan laut meliputi zona penangkapan di perairan Kepulauan Selayar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Mengingat besarnya potensi perikanan laut di wilayah ini maka kegiatan penangkapan ikan di perairan Kepulauan Selayar perlu didukung oleh fasilitas PPN dan PPI. PPN dikembangkan di Benteng dan PPI di Labuan Beropa dan Latokdok.

Dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi di Benteng diharapkan dapat menampung semua kegiatan perikanan dengan cakupan pelayanan yang lebih baik dan meluas. Melihat potensi perikanan berdasarkan cakupan wilayah dan sentra-sentra produksi perikanan, maka penting dilakukan pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpul pada sentra-sentra produksi perikanan tersebut, antara lain: pelabuhan perikanan rakyat Labuang Beropa di Kecamatan Pasimasunggu dan di Latokdok yang berfungsi membantu Pelabuhan Perikanan Nusantara Benteng. Kawasan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di perairan laut P. Jampea, P. Bonerate, P. Lambego (Kalao) dan P. Kalaotoa.

Kegiatan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas kegiatan budidaya laut dan kegiatan budidaya air payau (Tambak). Lokasi pengembangan yang potensial untuk budidaya air

payau berada di bagian pantai Pulau Selayar, Pulau Jampea, Pulau Kalao, Pulau Bonerate dan Pulau Kalaotoa. Jenis komoditas unggulan perikanan budidaya yaitu ikan kerapu, udang, bandeng, dan rumput laut. Lokasi potensial pengembangan budidaya ikan kerapu berada di seluruh perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebar di Kecamatan Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimarannu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur P. Tanajampea. Budidaya rumput laut dikembangkan di Kecamatan Bontomatene, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur. Budidaya bandeng dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur. Budidaya udang dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, Kawasan Perikanan Budidaya dengan luas 836,73 Ha, meliputi :

- a. sebagian Kec. Bontoharu dengan luas kurang lebih 196,43 Ha;
 - b. sebagian Kec. Bontosikuyu dengan luas kurang lebih 140,07 Ha;
 - c. sebagian Kec. Paimasunggu dengan luas kurang lebih 185,17 Ha;
- dan
- d. sebagian Kec. Pasimasunggu Timur dengan luas sekitar 315,06 Ha;

Sarana penunjang perikanan meliputi :

- a. Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan seluas 51 Ha di Hangkoang;
- b. Pelabuhan Perikanan Bonehalang Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara untuk area penggarapan berupa penyediaan sumber air untuk penggarapan di Bontoharu

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

Tabel 3.5
Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.

5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian & perkebunan serta perikanan
6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif, Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, tantangan pelayanan Dinas Perikanan dalam pembangunan daerah tercermin dari isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Optimalisasi daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

4. Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam).
5. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
6. Pengembangan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) dan pengembangan fasilitas pada sentra pendaratan ikan.
7. Optimalisasi peran investasi swasta dalam industri bisnis perikanan.
8. Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan.
9. Optimalisasi program dan kegiatan budidaya ikan dalam penanganan penyakit ikan dan pengendalian lingkungan pada perikanan budidaya serta pemanfaatan lahan potensial.
10. Optimalisasi peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun sistem logistik perbenihan
11. Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sistem data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan perikanan.

Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan skor kriteria, nilai skala kriteria, dan rata-rata skor kriteria sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Skor Kriteria penentuan isu strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	TOTAL	100

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-					Total Skor
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	4	3	4	4	4	19
2.	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	4	4	4	3	4	19
3.	Optimalisasi daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.	3	4	4	3	3	17
4.	Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam).	4	3	3	4	4	18
5.	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.	4	3	3	4	3	17
6.	Pengembangan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) dan pengembangan fasilitas pada sentra pendaratan ikan.	4	4	4	4	3	19
7.	Optimalisasi peran investasi swasta dalam industri bisnis perikanan.	3	3	4	3	4	17
8.	Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan	3	3	4	3	3	16

9.	Optimalisasi program dan kegiatan budidaya ikan dalam penanganan penyakit ikan dan pengendalian lingkungan pada perikanan budidaya serta pemanfaatan lahan potensial	2	4	3	3	3	15
10.	Optimalisasi peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun sistem logistik perbenihan	2	3	3	3	3	14
11.	Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sistem data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan perikanan.	4	3	4	4	3	18

Keterangan :

Penentuan Skala Kriteria berdasarkan Likert :

- 0 - 1: Rendah
- > 1 - 2: Sedang
- > 2 - 3: Cukup
- > 3 - 4: Tinggi

Dengan $n = 5$, maka didapatkan Isu Strategis sebagaimana terlihat pada table berikut ini.

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan

Peringkat	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	19	3,8
2.	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	19	3,8
3	Pengembangan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) dan pengembangan fasilitas pada sentra pendaratan ikan.	19	3,8
4.	Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam).	18	3,6
5.	Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sistem data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan perikanan.	18	3,6
6.	Optimalisasi daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.	17	3,4
7.	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan	17	3,4

Peringkat	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
	pemasaran produk hasil perikanan.		
8.	Optimalisasi peran investasi swasta dalam industri bisnis perikanan.	17	3,4
9.	Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan	16	3,2
10.	Optimalisasi program dan kegiatan budidaya ikan dalam penanganan penyakit ikan dan pengendalian lingkungan pada perikanan budidaya serta pemanfaatan lahan potensial	15	3,0
11.	Optimalisasi peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun sistem logistik perbenihan	14	2,8

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelayanan Dinas Perikanan adalah sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan yang mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana muatan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

4.1 TUJUAN

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut :

Misi Ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan

sasaran, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pelayanan Dinas Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-4, terkait dengan tujuan ke-5 : mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5) dan sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6) dengan indikator Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Penjabaran Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke Dalam Tujuan Renstra Berdasarkan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Perikanan

RPJMD		RENSTRA Dinas Perikanan
Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)
Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-5)	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan (T-3)

4.2 SASARAN

Sasaran strategis pembangunan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh perangkat daerah sebagai suatu keluaran berupa manfaat atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan sasaran strategis juga adalah penjabaran terhadap misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan.

Adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan bidang urusan perikanan dirumuskan sebagaimana pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan

RPJMD KEP. SELAYAR		RESNTRA DINAS PERIKANAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan ke-1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Tujuan ke-1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (S-1)
Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan			
Tujuan ke-5 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-4)	Sasaran ke-6 : Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Tujuan ke-3 : Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan (T-2)	2. Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (S-2)
			3. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3) 4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4) 5. Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)

RPJMD KEP. SELAYAR		RESNTRA DINAS PERIKANAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
			6. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (S-6) 7. Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S-7) 8. Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S-8) 9. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9) 10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Perikanan dengan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *Stakeholders Perspective*, *Costumer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*, dapat diurai sebagai berikut :

a. Stakeholders Perspective

S-1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Perikanan dari 64,67 % di tahun 2020 menjadi 85,00 % pada tahun 2026.

2. Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan (LAKIP OPD) dari 56,44 (CC) di tahun 2020 menjadi >80-90 (A) pada tahun 2026.

3. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu sesuai SAP selama periode Renstra.

S-2 : Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Volume Produksi Perikanan (Ton) 19.566,56 ton di tahun 2020 menjadi 31.049,71 ton pada tahun 2026.

b. Customer Perspective

S-3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja sasaran, yaitu volume produksi perikanan tangkap dari 18.861,2 ton di tahun 2020 menjadi 27.713,3 ton pada tahun 2026.

S-4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja sasaran, yaitu volume produksi perikanan budidaya dari 837,36 ton di tahun 2020 menjadi 1.328,82 ton pada tahun 2026.

S-5 : Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu volume produk olahan hasil perikanan, dari 158,49 ton di tahun 2020 menjadi 269,82 ton pada tahun 2026.

c. Internal Process Perspective

S-6 : Meningkatnya Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Persentase Ketaatan Usaha

Perikanan Budidaya Dalam Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dari na % di tahun 2020 menjadi 26,34 % pada tahun 2026.

S-7 : Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Produksi Kelompok Perikanan Tangkap (KUB) dari 8.814,61 Ton di tahun 2020 menjadi 14.196,02 Ton pada tahun 2026.
2. Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang diberdayakan dari 52 Kelompok di tahun 2020 menjadi 85 Kelompok pada tahun 2026.

S-8 : Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra Pendaratan Ikan yang Operasional, dari 1 unit TPI di tahun 2020 menjadi 1 unit TPI dan 5 lokasi Sentra Pendaratan Ikan pada tahun 2026.
2. Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan dari 2 Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil di tahun 2020 menjadi 127 Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil dan 15 rekomendasi IUP Pembudidaya Ikan Kecil pada tahun 2026.

S-9 : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan (KUB) dari tahun 2022 menjadi 150 KUB pada tahun 2026.
2. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dari tahun 2022 menjadi 81 POKDAKAN pada tahun 2026.

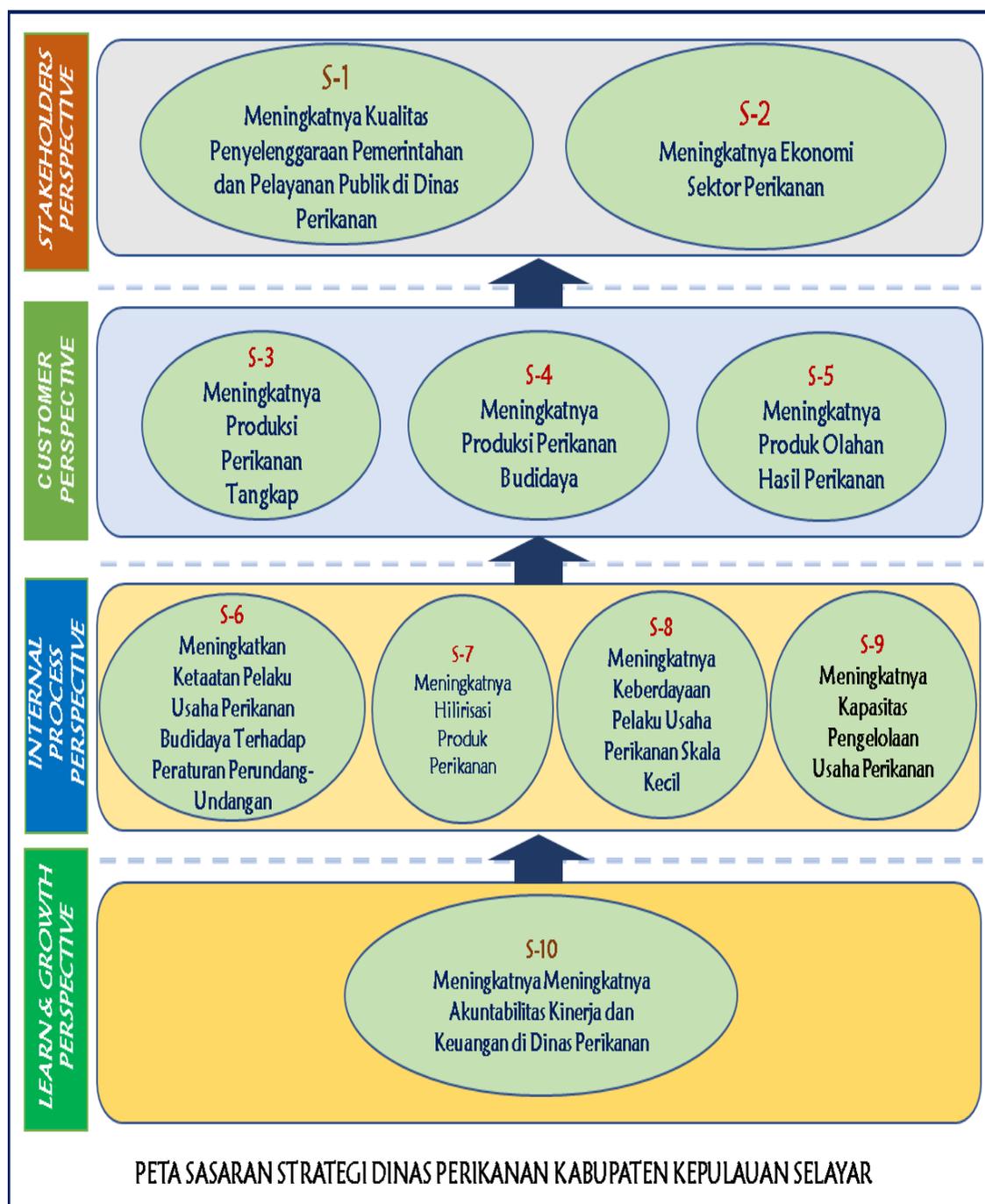
d. Learning and Growth Perspective

S-10 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%) dari 56,44 % di tahun 2020 menjadi 81,00 % pada tahun 2026.
2. Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%) dari 93,88 % di tahun 2020 menjadi 94,99 % pada tahun 2026.

Gambar 4.1

Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan



Berikut ini uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan arahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026.

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Stakeholders Perspective							
Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (CC)	73,00 (CC)	76,00 (CC)
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)	71,45 %	74,84 %	78,23 %	81,62 %	85,01 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)		Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1 M)	1.944,63	2.119,64	2.321,01	2.553,11	2.821,18
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (S-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	22.822,46	24.648,26	26.620,12	28.749,73	31.049,71

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Customer Perspective							
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.845,74	23.593,40	25.480,87	27.519,34	29.720,89
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	976,72	1.054,86	1.139,25	1.230,39	1.328,82
	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	186,57	201,49	231,34	249,84	269,82
Internal Process Perspective							
	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (S-6)	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dalam Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5,27 %	10,54 %	15,81 %	21,07 %	26,34 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S-7)	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	9.696,07	10.665,68	11.732,25	12.905,47	14.196,02
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang diberdayakan (Kelompok)	4	6	9	6	8
	Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S-8)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra
		Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan (TDPIK dan Rek. IUP)	25 TDPIK	25 TDPIK	25 TDPIK	25 TDPIK	25 TDPIK
			3 Rek. IUP	3 Rek. IUP	3 Rek. IUP	3 Rek. IUP	3 Rek. IUP
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9)	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan (KUB)	30 Klp	30 Klp	30 Klp	30 Klp	30 Klp
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	16 Klp	19 Klp	12 Klp	19 Klp	15 Klp

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Learning and Growth Perspective							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)	Persentase Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%)	64,64 %	68,74 %	72,84 %	76,94 %	81,00 %
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	94,25 %	94,44 %	94,62 %	94,81 %	94,99 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Fauzie (dalam Nasyrah Aziz, 2013), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu: (1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (*competitive advantage*) berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*); (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu: (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumberdaya alam (*resources driven*); (b) fase kedua adalah pembangunan yang digerakkan oleh investasi (*investment driven*) dan; (c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (*innovation driven*).

Dalam pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap maupun budidaya saja. Menurut Hendri (2010), peluang bisnis kelautan dan perikanan setidaknya dapat dilihat dari dua faktor, yaitu : (1) faktor internal berupa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, potensi sumberdaya

manusia, teknologi, sarana dan prasarana serta pemasaran, dan (2) faktor eksternal yang berkaitan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut dalam rangka persaingan. Olehnya itu strategi dan kebijakan pembangunan bidang perikanan yang diterapkan haruslah bersifat menyeluruh dan terpadu antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

5.1 STRATEGI

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD periode tahun 2021-2026. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Olehnya itu strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kepulauan Selayar menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembangunan sektor perikanan memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal

yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dalam mengembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan alternatif strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.1.1 Faktor Internal (IFAS)

a. Kekuatan (Strength), antara lain terdiri dari :

1. Potensi perikanan laut yang tinggi dengan jumlah armada 6.462 unit.
2. Potensi perikanan budidaya dengan luas lahan budidaya (budidaya air payau : 1.16 ha, air tawar : 819.97 & air laut : 11432,55 ha
3. Pengarusutamaan sektor perikanan dalam RPJMD Kabupaten.
4. Tersedia aset & infrastruktur UPI, TPI, Pabrik Es, dan BBI
5. Ketersediaan anggaran pada dinas perikanan

b. Kelemahan (Weakness), antara lain terdiri dari :

1. Masih rendahnya produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya serta nilai tambah produk masih rendah.
2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah
3. Skala usaha masih subsistem, belum berorientasi pasar
4. Jangkauan pengumpulan produk dan rantai distribusi relatif panjang.
5. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat

6. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perikanan.

5.1.2 Faktor Eksternal (EFAS)

a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :

1. Permintaan produk perikanan sangat tinggi
2. Posisi geografis Selayar yang strategis sebagai penghubung simpul KBI-KTI
3. Tersedia Tol Laut dan kapal Kontainer untuk pemasaran produk perikanan
4. Tingginya minat swasta untuk berinvestasi di sektor perikanan
5. Banyaknya nelayan dari luar daerah yang menangkap ikan di Selayar

b. Ancaman (Treath), terdiri dari :

1. Terbatasnya kewenangan kabupaten dalam urusan sektor perikanan
2. Tingginya intensitas transshipment.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan akibat maraknya IUU fishing
4. Minimnya dukungan kebijakan dari K/L/propinsi
5. Banyaknya nelayan dari luar daerah yang menangkap ikan di Selayar

Gambar 5.1
Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perikanan

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar		
<p>IFAS : Internal Strategic Factory Analysis Summary</p> <p>EFAS : Eksternal Strategic Factory Analysis Summary</p>	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi perikanan laut yang tinggi dengan jumlah armada : 6.462 unit. Potensi perikanan budidaya dengan luas lahan budidaya (budidaya air payau : 1.16 ha, air tawar : 819.97 & air laut : 11432,55 ha Pengarusutamaan sektor perikanan dalam RPJMD Kabupaten. Tersedia aset & infrastruktur UPI, TPI, Pabrik Es, dan BBI Ketersediaan anggaran pada dinas perikanan 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah Masih rendahnya produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya serta nilai tambah produk masih rendah. Skala usaha masih subsistem, belum berorientasi pasar Jangkauan pengumpulan produk dan rantai distribusi relatif panjang. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perikanan.
<p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Permintaan produk perikanan sangat tinggi Posisi geografis Selayar yang strategis sebagai simpul penghubung KBI-KTI Tersedia Tol Laut dan kapal Kontainer untuk pemasaran produk perikanan Tingginya minat swasta untuk berinvestasi di sektor perikanan Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam program KIPT 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peningkatan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang besar dan tenaga kerja perikanan. Peningkatan nilai tambah produksi perikanan melalui peningkatan kualitas mutu dan sistem pengolahan dan pemasaran yang efisien 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong kebangkitan industri perikanan melalui penguatan infrastruktur pada sentra-sentra pendaratan ikan (Program Prioritas KIPT)
<p>Threat (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya kewenangan kabupaten dalam urusan sektor perikanan Tingginya intensitas transshipment. Menurunnya daya dukung lingkungan akibat maraknya IUU fishing Minimnya dukungan kebijakan dari K/L/propinsi Banyaknya nelayan andon yang menangkap ikan di Selayar 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Meraih dukungan kebijakan K/L/swasta melalui komunikasi dan koordinasi dalam mengembangkan sektor perikanan Selayar khususnya program KIPT Menjaga keberlanjutan sumberdaya laut melalui koordinasi instansi vertical dan masyarakat di daerah. 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dengan meningkatkan keterampilan, penguatan kelompok dan mendorong kerjasama dan dukungan semua pihak terutama swasta Memperkuat dukungan usaha perikanan berbasis desa melalui Kerjasama pemerintah desa (Program Gerbangsari)

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut tabel arah kebijakan Dinas Perikanan mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPJMD periode tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan ke-1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan		
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan	Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur 2. Meningkatkan cakupan sarana dan prasarana perkantoran. 3. Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART
Tujuan ke-2 : Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan		
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	(SO-1) Mengoptimalkan peningkatan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang besar dan tenaga kerja perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan armada perikanan, API, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan - Menyediakan sarana & prasarana perikanan budidaya - Mengembangkan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan

	<p>(SO-2) Peningkatan nilai tambah produksi perikanan melalui peningkatan kualitas mutu dan sistem pengolahan dan pemasaran yang efisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik hasil perikanan - Menyediakan dan meningkatkan sarpras sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan. - Melakukan pembinaan pelaku usaha pengolahan & penguatan daya saing UPI
	<p>(WO-1) Mendorong kebangkitan industri perikanan melalui penguatan infrastruktur pada sentra-sentra pendaratan ikan (Program Prioritas KIPT RPJMD 2021-2026)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakselerasi pembangunan KIPT Hangkoang ke dalam program dan kegiatan - Membangun infrastruktur perikanan pada KIPT dan sub sentra pendaratan di basis-basis produksi
	<p>(ST-1) Meraih dukungan kebijakan K/L/swasta melalui komunikasi dan koordinasi dalam mengembangkan sektor perikanan Selayar khususnya program KIPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Lokus Prioritas Pembangunan Desa Nelayan dan Desa Pembudidaya - Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran antara pemerintah dan pemerintah daerah serta lintas sektor
	<p>(ST-2) Menjaga keberlanjutan sumberdaya laut melalui koordinasi instansi vertical dan masyarakat di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum
	<p>(WT-1) Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dengan meningkatkan keterampilan, penguatan kelompok dan mendorong kerjasama dan dukungan semua pihak terutama swasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemberdayaan masyarakat perikanan melalui pendampingan, pelatihan, dan penguatan kelompok usaha perikanan - Memfasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan skala kecil - Melakukan pendampingan, kemudahan akses Iptek dan informasi
	<p>(WT-2) Memperkuat dukungan usaha perikanan berbasis desa melalui Kerjasama pemerintah desa (Program Gerbangsari RPJMD Tahun 2021-2026)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan pada desa-desa sentra produksi perikanan yang ditetapkan sebagai lokus - Penyediaan infrastruktur perikanan pada desa sentra yang ditetapkan sebagai lokus KIPT dan Gerbangsari

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.1 Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Berasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, salah satu program strategis pembangunan daerah dan menjadi pilar Visi Kepala Daerah yaitu Pembangunan KIPT di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu, dengan didukung oleh 5 (lima) sub sentra :

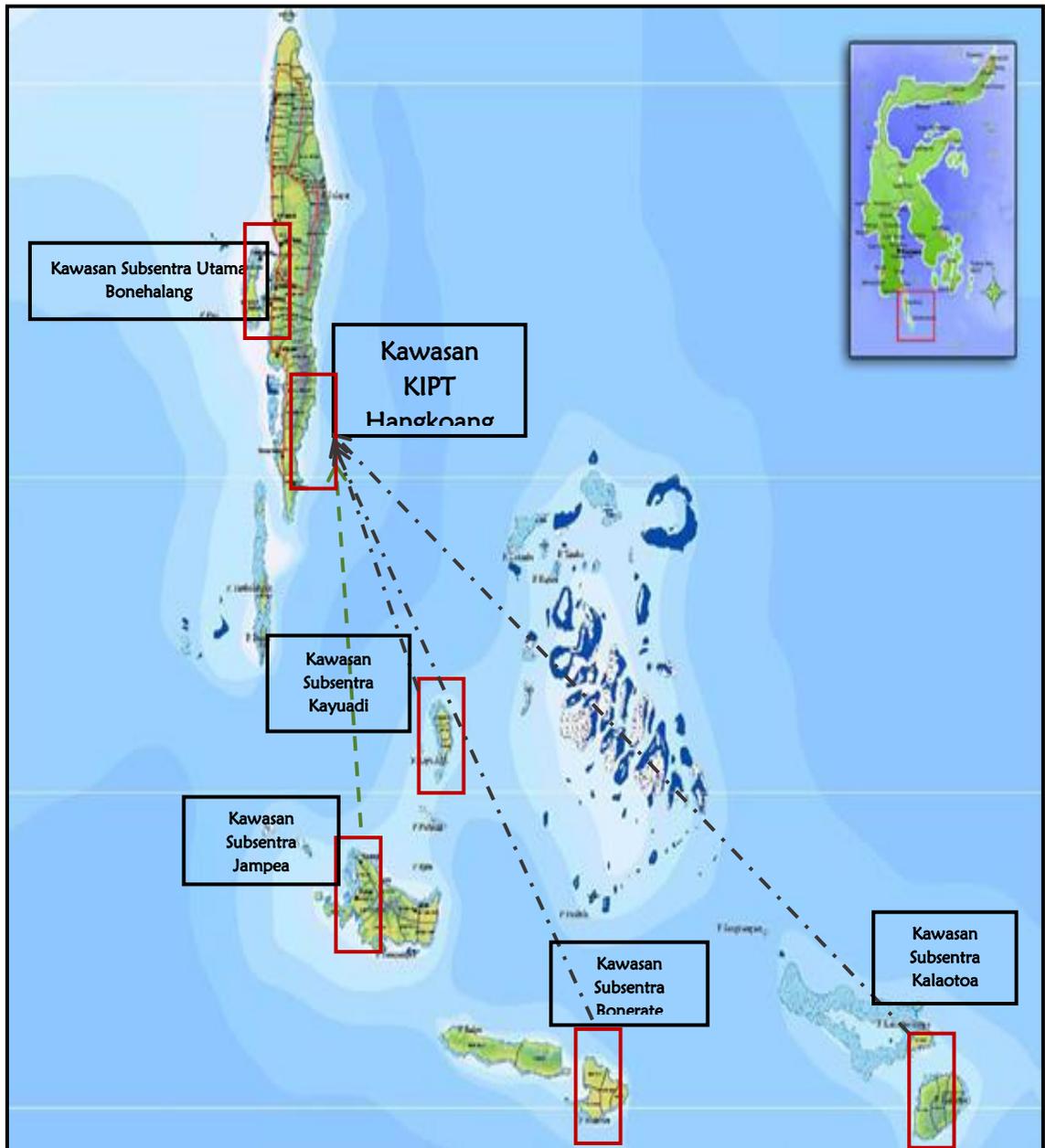
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
- b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa ;

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri perikanan.

Gambar 6.1

Peta Skema Keterkaitan Sentra KIPT Hangkoang Dengan Kawasan Subsentra Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 6.2

Peta Rencana Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Hangkoang Kabupaten Kepulauan Selayar



Kerangka Pembangunan KIPT telah diurai dalam bentuk matriks yang dihasilkan oleh Tim Pelaksana 100 Hari Bupati Terpilih. Matriks tersebut menjadi acuan masing-masing perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Berikut matriks pembangunan KIPT yang berkenaan dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diurai pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Matriks Tahapan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

NO	TARGET RPJM	TARGET RENSTRA	KELUARAN (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp. Juta)	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKSANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dimulainya Pembangunan Prasarana pada Zona Pemberdayaan Masyarakat dalam KIPT	1. Terbangunnya Fasilitas Pabrik Es 2. Terbangunnya Tempat Pemasaran Ikan 3. Terbangunnya Fasilitas Cold Storage dan Pembekuan Ikan 4. Terbangunnya Prasarana Pengolahan Limbah	Pembangunan Gedung & Fasilitas Pabrik Es Pembangunan Gedung Tempat Pemasaran ikan Pembangunan Gedung Cold Storage dan Pembekuan Ikan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah	3.000 1.000 4.000 750						DISPER / DISPERINDAG KUKM DISPER DISPER / DISPERINDAG KUKM DLH
2.	Dimulainya Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Hangkoang	Terbangunnya Pelabuhan Hangkoang	Pembangunan Pelabuhan Hangkoang, dengan Bobot Fisik 50%	170.000						DISPER / DISHUB K/L
3.	Masuknya Investasi pada Program Pembangunan KIPT	Tersedianya Investasi Pembangunan KIPT	Modal Pembangunan pada zona : 1. Industri Pengolahan Ikan Beku 2. Industri pengolahan ikan produk akhir 3. Industri pengolahan berbahan baku ikan 4. Industri pengelolaan fasilitas ikan hidup	5.000						DISPERINDAG KUKM

4.	Dimulainya Pembangunan Sub Sentra KIPT	1. Tersedianya Lahan untuk Sub Sentra	Dokumen kepemilikan tanah 4 ha	3.000						DIS PUTR
		2. Terbangunnya Fasilitas Sub Sentra KIPT Bonerate	1. Pembangunan Gedung & Fasilitas Pabrik Es 2. Pembangunan Gedung Pelelangan dan Penyortiran Ikan 3. Pembangunan Fasilitas Air Bersih	3.000 1.000 700						DISPER / DISPERINDAG KUKM DISPER DIS PMD (PEMDES)
			4. Pembangunan Gedung & Fasilitas Cold Storage	3.000						DISPER / DISPERINDAG KUKM
			5. Pembangunan Fasilitas Listrik	200						DISHUB & PLN
		3. Terbangunnya Fasilitas Sub Sentra KIPT Kawau-Kalatoa	1. Pembangunan Gedung dan Fasilitas Pabrik Es	3.000						DISPER
			2. Pembangunan Gedung Pelelangan dan Penyortiran Ikan	1.000						DISPER
			3. Pembangunan Fasilitas Air Bersih	700						DIS PMD (PEMDES)
			4. Pembangunan Gedung & Fasilitas Cold Storage	3.000						DISPER / DISPERINDAG KUKM
			5. Pembangunan Fasilitas Listrik	200						DIS PUTR / PLN
		4. Terbangunnya Fasilitas Sub Sentra KIPT Benteng - Jampea	1. Pembangunan Gedung dan Fasilitas Pabrik Es	850						DISPER / DISPERINDAG KUKM
			2. Pembangunan Fasilitas Air Bersih dengan Bobot Fisik 10 %	300						DIS PMD (PEMDES)
			3. Pembangunan Fasilitas Listrik, dengan Bobot Fisik 10 %	100						DISHUB / PLN
		5. Terbangunnya Fasilitas Sub Sentra KIPT Kayuadi	1. Pembangunan Gedung dan Fasilitas Pabrik Es	1.700						DISPER

			2. Pembangunan fasilitas air bersih dengan bobot fisik 10 %	300						DIS PMD (PEMDES)
			3. Pembangunan fasilitas listrik, dengan bobot fisik 10 %	200						DISHUB / PLN
		6. Terbangunnya Fasilitas Sub Sentra Utama KIPT Benteng – Selayar	1. Rehabilitasi Pabrik Es	1.000						DISPER
			2. Rehabilitasi Coldstorage	500						DISPER
			3. Rehabilitasi TPI/Ruang Beku Ikan	1.000						DISPER

6.1.2 Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANGSARI)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

Keterkaitan dukungan berdasarkan pelayanan Dinas Perikanan dalam Program GERBANGSARI terletak pada dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, yang memiliki tujuan utama

meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada lokasi desa yang dipilih berdasarkan skala prioritas. Adapun desa-desa prioritas yang direncanakan diarahkan pada skema “Kampung Nelayan”, yaitu :

1. Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu
2. Desa Appatanah dan Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu
3. Desa Pasitallu dan Desa Pasitallu Timur Kecamatan Takabonerate
4. Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu
5. Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu
6. Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN

Strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya, diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun ke depan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, meliputi kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, meliputi kegiatan :

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, meliputi kegiatan :

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro.

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

6.2 KELOMPOK SASARAN

Lokus pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan pada Dinas Perikanan selain diprioritaskan pada lokasi-lokasi untuk memperkuat Program Prioritas Pembangunan Daerah khususnya Program KIPT dan GERBANGSARI yang meliputi sentra dan subsentra KIPT serta prioritas desa GERBANGSARI, juga memprioritaskan pada kelompok sasaran yang meliputi :

1. Aparatur Dinas Perikanan dan Petugas BBI .

2. Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta masyarakat pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3. Masyarakat Petambak garam.

4. Kelompok-kelompok pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
5. Kelompok-Kelompok Pembudidaya ikan dan Kelompok Nelayan.
6. Kelompok Usaha Garam Rakyat.
7. Badan Usaha Perikanan.

6.3 PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021-2026, pendanaan yang bersifat indikatif diharapkan bersumber dari Dana APBN, DAK, APBD Propinsi Sulawesi Selatan, APBD Kabupaten, Tugas Perbantuan, dan sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022-2026

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%)	56,44%	64,64%	68,74%	72,84%	76,94%	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	6,928,170,608	Sekretariat Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
			Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	93,88%	94,25%	94,44%	94,62%	94,81%	94,99%	94,99%	94,99%	94,99%	94,99%	94,99%	6,928,170,608			
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	636,000,000	Sub Bagian Program			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	300,000,000				
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKASKPD yang terkoordinasikan dan tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15,000,000				
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKASKPD yang terkoordinasikan dan tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15,000,000				
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPASKPD yang terkoordinasikan dan tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15,000,000				
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPASKPD yang terkoordinasikan dan tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15,000,000				
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang terkoordinasikan dan tersusun	3 lap	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	45,000,000				
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang di buat	5 lap	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	231,000,000				
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan Keterpenuhan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,361,101,451	Sub Bagian Keuangan			
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,281,946,388				
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12,155,063				
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi Keuangan SKPD	5 dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	20,000,000				
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5,000,000				
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Akhir tahun	1 Lap	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15,000,000				

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Na	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000		
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 Lap	12 dok	5,000,000	12 dok	5,000,000	12 dok	5,000,000	12 dok	5,000,000	12 dok	5,000,000	12 dok	5,000,000		
		8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan analisis prognosissanggaran	1 Lap	1 dok	12,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	12,000,000		
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan keterpenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (%)	100%	100%	95,000,000	100%	66,250,000	100%	67,562,500	100%	68,940,625	100%	70,387,656	100%	70,387,656		
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen RKBU	2 dok	2 dok	5,000,000	2 dok	5,250,000	2 dok	5,512,500	2 dok	5,788,125	2 dok	6,077,531	2 dok	6,077,531		
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diberi pengamanan	Na	25%	50,000,000	50%	20,000,000	75%	20,000,000	85%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000		
		3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengkoordinasian dan penilaian BMD	Na	2 Kali	15,000,000	2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000		
		4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian BMD	2 Kali	2 kali	10,000,000	2 kali	10,500,000	2 kali	11,025,000	2 kali	11,576,250	2 kali	12,155,063	2 kali	12,155,063		Sub Bagian Keuangan
		5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4 Lap	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000		
		6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang Milik Daerah	1 Dokumen/Laporan	1 dok/lap	10,000,000	1 dok/lap	10,500,000	1 dok/lap	11,025,000	1 dok/lap	11,576,250	1 dok/lap	12,155,063	1 dok/lap	12,155,063		
		7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD Yang dimanfaatkan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah (%)	Na	100%	50,000,000	100%	52,500,000	100%	27,562,500	100%	28,940,625	100%	30,387,656	100%	30,387,656		
		1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,250,000	1 Dok	5,512,500	1 Dok	5,788,125	1 Dok	6,077,531	1 Dok	6,077,531		
		2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Pengembangan Retribusi Daerah	Na	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,250,000	1 Dok	5,512,500	1 Dok	5,788,125	1 Dok	6,077,531	1 Dok	6,077,531		
		3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan Kebijakan Retribusi	Na	75 Peserta	15,000,000	75 Peserta	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		Sub Bagian Keuangan
		4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Yang didaftarkan	Na	10	10,000,000	10	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tersedia Data Retribusi Daerah	Na	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,250,000	1 Dok	5,512,500	1 Dok	5,788,125	1 Dok	6,077,531	1 Dok	6,077,531		
		6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Data Jumlah Wajib Retribusi	Na	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,250,000	1 Dok	5,512,500	1 Dok	5,788,125	1 Dok	6,077,531	1 Dok	6,077,531		
		7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Retribusi	Na	1 Lap	5,000,000	1 Lap	5,250,000	1 Lap	5,512,500	1 Lap	5,788,125	1 Lap	6,077,531	1 Lap	6,077,531		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pegawai perangkat daerah (%)	Na	100%	376,500,000	100%	269,050,000	100%	358,755,000	100%	270,320,500	100%	271,052,550	100%	271,052,550	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum	
		1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya biaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Na	216 orang	81,000,000	0	0	217 orang	89,100,000	0	0	0	0	0	0		
		3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data dan pengolahan administrasi pegawai	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Bulan)	12	12	5,500,000	12	6,050,000	12	6,655,000	12	7,320,500	12	8,052,550	12	8,052,550		
		5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang dievaluasi kerjanya	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang pensiun	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang meninggal dunia	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8 Pemindahan Tugas ASN	Tersedianya biaya pemindahan tugas ASN	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop berdasarkan tugas fungsi	Na	12 orang	180,000,000	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000		
		10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	Na	80 orang	60,000,000	80 orang	63,000,000	80 orang	63,000,000	80 orang	63,000,000	80 orang	63,000,000	80 orang	63,000,000		
		11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Na	5 orang	50,000,000	5 orang	50,000,000	5 orang	50,000,000	5 orang	50,000,000	5 orang	50,000,000	5 orang	50,000,000		
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	100%	434,193,500	100%	457,296,050	100%	481,693,015	100%	507,463,045	100%	534,690,113	100%	534,690,113		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang tersedia	1 tahun	8 jenis	2,200,000	8 jenis	2,420,000	8 jenis	2,662,000	8 jenis	2,928,200	8 jenis	3,221,020	8 jenis	3,221,020		
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	10 buah	9 jenis	3,300,000	9 jenis	3,630,000	9 jenis	3,993,000	9 jenis	4,392,300	9 jenis	4,831,530	9 jenis	4,831,530		
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12	12	13,777,500	12	15,155,250	12	16,670,775	12	18,337,853	12	20,171,638	12	20,171,638		
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Na	4 jenis	8,580,000	4 jenis	9,438,000	4 jenis	10,381,800	4 jenis	11,419,980	4 jenis	12,561,978	4 jenis	12,561,978		
		7 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu (Bulan)	Na	12	6,336,000	12	6,652,800	12	6,985,440	12	7,334,712	12	7,701,448	12	7,701,448		
		9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan)	12	12	400,000,000	12	420,000,000	12	441,000,000	12	463,050,000	12	486,202,500	12	486,202,500		
		10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang Dinamis	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja dari BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Na	100%	72,500,000	100%	125,000,000	100%	25,000,000	100%	93,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000		
		1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	Na	0	0	2 unit	50,000,000	0	0	2 unit	50,000,000	0	0	0	0		
		3 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang diadakan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Na	5 unit	17,500,000	0	0	0	0	11 unit	18,000,000	0	0	0	0		
		6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Na	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000		
		7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya yang tersedia	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang tersedia	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diadakan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantoryang diadakan	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedungkantor yang diadakan (unit)	Na	1	30,000,000	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
		8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjangurusan pemerintahan (%)	Na	100%	758,117,347	100%	776,444,682	100%	814,000,100	100%	852,252,026	100%	891,266,005	100%	891,266,005		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Na	12 Bulan	8,794,500	12	9,673,950	12	10,641,345	12	11,705,480	12	12,876,027	12	12,876,027		
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik (Bulan)	12 bulan	12 bulan	71,874,847	12	77,916,932	12	84,505,955	12	91,693,747	12	99,537,178	12	99,537,178		
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)	Na	12 Bulan	677,448,000	12	688,853,800	12	718,852,800	12	748,852,800	12	778,852,800	12	778,852,800		
		9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	Na	100%	197,584,353	100%	168,924,557	100%	144,385,892	100%	130,411,121	100%	108,285,176	100%	108,285,176		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 unit	1 unit	38,630,000	1 unit	40,561,500	1 unit	42,589,575	1 unit	44,719,054	1 unit	46,955,006	1 unit	46,955,006		
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	30 unit	37 unit	47,930,000	37 unit	47,930,000	37 unit	47,930,000	37 unit	47,930,000	37 unit	47,930,000	37 unit	47,930,000		
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang terpelihara	30 unit	17 unit	11,024,353	18 unit	12,000,000	19 unit	12,500,000	19 unit	12,762,067	20 unit	13,400,170	20 unit	13,400,170		
		7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang terpelihara	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang terpelihara	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	Na	4 gedung	100,000,000	3 gedung	68,433,057	3 gedung	41,366,317	3 gedung	25,000,000	0	0	0	0		
		10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantoryang terpelihara	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukunggedung kantor yang terpelihara	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang terpelihara/direhabilitasi	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	18.729,20	21.846	4,024,406,100	23.593	4,079,500,220	25.481	4,181,610,110	27.519	4,281,926,937	29.721	4,384,093,713	29.721	4,384,093,713		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 1. Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten (Dokumen)	1 Dok	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	21 Dok	100,000,000		
		1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dan jenis data & informasi perikanan tangkap yang tersedia	1 Dok	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	4 Dok	100,000,000	21 Dok	100,000,000		
		2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok nelayan (KUB)	Na	30 KUB	3,274,406,100	30	3,379,500,220	30	3,453,926,007	30	3,496,926,937	30	3,534,093,713	150 KUB	3,534,093,713		
			Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.814,61	9.696,07 Ton		10.665,68		11.732,25		12.965,47		14.196,02		14.196,02			
		1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah (KUB)	Na	30 KUB	2,597,500,000	30	2,673,526,600	30	2,700,000,000	30	2,757,375,051	30	2,771,203,980	150	2,771,203,980		
		2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang terbentuk dan memperoleh kegiatan pelatihan, pendampingan dan penguatan kelembagaan (KUB)	476 KUB	30 KUB	426,906,100	30 KUB	455,973,620	30 KUB	538,926,007	30 KUB	524,551,886	30 KUB	537,889,733	626 KUB	537,889,733		
		3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan kecil yang memperoleh layanan dan fasilitas kemudahan akses iptek dan informasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha (Orang)	4.000	100 Orang	250,000,000	100	250,000,000	100	215,000,000	100	215,000,000	100	225,000,000	4.500	225,000,000		
		3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra Pendaratan yang Operasional dan terkelola	1 Unit TPI	1 Unit TPI dan 1 Sentra Pendaratan	650,000,000	1 Unit TPI dan 1 Sentra Pendaratan	600,000,000	1 Unit TPI dan 1 Sentra Pendaratan	627,684,103	1 Unit TPI dan 1 Sentra Pendaratan	685,000,000	1 Unit TPI dan 1 Sentra Pendaratan	750,000,000	1 Unit TPI dan 5 Sentra Pendaratan	750,000,000		
		1. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dan Sentra pendaratan yang ditetapkan	1 dok	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	175,000,000	1 dok	175,000,000	6 dok	175,000,000		
		2. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Sarana dan prasarana yang disiapkan dan operasional di TPI, Sentra dan Subsentra pendaratan ikan (unit)	2 unit	1	500,000,000	1	450,000,000	1	477,684,103	1	510,000,000	1	575,000,000	7 unit	575,000,000		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	160,84	186,57	1,250,000,000	201,49	1,267,112,500	231,34	1,298,828,326	249,84	1,329,987,217	269,82	1,361,720,712	269,82	1,361,720,712		
		1. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diterbitkan (Dokumen)	1	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	11	70,000,000	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Kepulauan Selayar
		1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang tersedia (Dokumen)	1	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	11	70,000,000		
		2. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro yang Mendapatkan Pembinaan (Orang)	na	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	100,000,000		
			Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	na	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	100,000,000		
		1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Orang)	na	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	100,000,000		
		3. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ikan yang dipasarkan ke Luar Daerah (Ton)	145,71	169,02	1,080,000,000	182,54	1,097,112,500	197,14	1,128,828,326	212,91	1,159,987,217	229,94	1,191,720,712	229,94	1,191,720,712		
			Jumlah Infrastruktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Diadakan (Unit)	Na	1	1,080,000,000	1	1,097,112,500	1	1,128,828,326	1	1,159,987,217	1	1,191,720,712	5	1,191,720,712		
		1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Ikan yang dipasarkan ke Luar Daerah (Ton)	145,71	169,02	984,000,000	182,54	1,001,112,500	197,14	1,032,828,326	212,91	1,063,987,217	229,94	1,095,720,712	229,94	1,095,720,712		
			Jumlah Infrastruktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Diadakan (Unit)	na	1	984,000,000	1	1,001,112,500	1	1,032,828,326	1	1,063,987,217	1	1,095,720,712	5	1,095,720,712		
		2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan fasilitas Sarpras Pengolahan dan pemasaran Ikan (kelompok)	na	11	96,000,000	10	96,000,000	11	96,000,000	10	96,000,000	11	96,000,000	53	96,000,000		

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	837,36	976,72	1,380,000,000	1.054,9	1,398,892,200	1.139,3	1,433,906,472	1.230,4	1,468,305,888	1.328,8	1,503,339,667	1.328,8	1,503,339,667		
		1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan izin usaha perikanan	0	3 rekomendasi	25,000,000	3 rekomendasi	15,750,000	3 rekomendasi	16,537,500	3 rekomendasi	17,364,375	3 rekomendasi	18,232,594	15 rekomendasi	18,232,594		
		1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha yang ditetapkan	0	1 dok	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-		
		2. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan izin usaha perikanan	0	3 rekomendasi	15,000,000	3 rekomendasi	15,750,000	3 rekomendasi	16,537,500	3 rekomendasi	17,364,375	3 rekomendasi	18,232,594	15 rekomendasi	18,232,594		
		2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil	2 rek. TDP	25 rek. TDP	30,000,000	25 rek. TDP	22,000,000	25 rek. TDP	24,200,000	25 rek. TDP	26,620,000	25 rek. TDP	29,282,000	127 rek. TDP	29,282,000		
		1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil	0	1 dok	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-		
		2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil	2 rek. TDP	25 rek. TDP	20,000,000	25 rek. TDP	22,000,000	25 rek. TDP	24,200,000	25 rek. TDP	26,620,000	25 rek. TDP	29,282,000	127 rek. TDP	29,282,000		
		3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang diberdayakan	52 klpk	4 klpk	77,000,000	6 klpk	97,000,000	9 klpk	250,440,000	6 klpk	109,712,000	8 klpk	136,218,850	85 klpk	136,218,850		
		1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitasnya	0	1 klpk	35,000,000	1 klpk	35,000,000	1 klpk	38,500,000	1 klpk	40,425,000	1 klpk	44,467,500	5 klpk	44,467,500		
		2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang difasilitasi pembentukannya dan dikembangkan kelembagaannya	52 klpk	3 klpk	42,000,000	3 klpk	42,000,000	3 klpk	71,940,000	3 klpk	49,287,000	3 klpk	51,751,350	15 klpk	51,751,350		
		3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha	0					3 klpk	35,000,000			2 klpk	20,000,000	5 klpk	20,000,000		
		4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pendidikan & pelatihan	0			2 klpk	20,000,000	2 klpk	105,000,000	2 klpk	20,000,000	2 klpk	20,000,000	8 klpk	20,000,000		

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
Kab. Kepulauan Selayar

Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kinerja Penanggung jawab	lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	na	16 klpk	1,248,000,000	19 klpk	1,264,142,200	12 klpk	1,142,728,972	19	1,314,609,513	15	1,319,606,223	81	1,319,606,223		
		1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	na	4 laporan	90,000,000	2 laporan	58,192,200	2 laporan	63,300,000	2 laporan	69,630,000	2 laporan	76,593,000	12 laporan	76,593,000		
		2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan	7 unit	4 unit	80,600,000	3 unit	130,600,000	3 unit	127,543,972	3 unit	121,901,558	5 Unit	75,600,000	25 Unit	75,600,000		
		3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sarana pembudidayaan ikan	na	16 klpk	817,400,000	19 klpk	752,350,000	12 klpk	626,235,000	19 klpk	775,595,455	15 klpk	740,639,549	81 klpk	740,639,549		
		4 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi untuk pembudidayaan ikan di darat	1,14 ha	4,14 ha	160,000,000	4,14 ha	176,000,000	4,14 ha	193,600,000	4,14 ha	209,330,000	4,14 ha	230,263,000	21,84 ha	230,263,000		
		5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok yang dibina dan dipantau	0								10 klpk	50,000,000	10 klpk	50,000,000			
		6 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benur yang digelondongkan	268.000 ekor	100.000 ekor	100,000,000	100.000 ekor	126,000,000	100.000 ekor	110,000,000	100.000 ekor	115,000,000	100.000 ekor	121,042,924	100.000 ekor	121,042,924		
		7 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diamati dan dianalisis untuk pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya (sampel)	Na			6 sampel	21,000,000	6 sampel	22,050,000	6 sampel	23,152,500	6 sampel	25,467,750	6 sampel	25,467,750		
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)	5,00	5,27	20,000,000	10,54	20,273,800	15,81	20,781,253	21,07	21,279,795	26,34	21,787,531	26,34	21,787,531		
		1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya dalam Kabupaten/Kota yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	50 org	20,000,000	50 org	20,273,800	50 org	20,781,253	50 org	21,279,795	50 org	21,787,531	250 org	21,787,531		
		1. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya dalam Kabupaten/Kota yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	50 org	20,000,000	50 org	20,273,800	50 org	20,781,253	50 org	21,279,795	50 org	21,787,531	250 org	21,787,531		
TOTAL						12,915,301,300		13,129,994,009		13,492,622,668		13,845,032,520		14,199,112,231				

Kab. Kepulauan Selayar

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan komitmen Perangkat Daerah terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun ke depan. Pernyataan dukungan dan komitmen tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sehingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan salah satu bagian dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, terdapat IKK outcome dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pilihan kelautan dan perikanan, yaitu total jumlah produksi perikanan, berupa produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ke dalam pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi Amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan perikanan telah diuraikan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan pada bab sebelumnya. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diuraikan dalam tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan (%)	56,44 %	64,64 %	68,74 %	72,84 %	76,94 %	81,00 %	81,00 %
2.	Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	93,88 %	94,25 %	94,44 %	94,62 %	94,81 %	94,99 %	94,99 %
3.	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	18.729,20	21.845,74	23.593,40	25.480,87	27.519,34	29.720,89	29.720,89
4.	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	837,36	976,72	1.054,86	1.139,25	1.230,39	1.328,82	1.328,82
5.	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	160,84	186,57	201,49	231,34	249,84	269,82	269,82
6.	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dalam Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (%)	5,00	5,27 %	10,54 %	15,81 %	21,07 %	26,34 %	26,34 %

BAB VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan perikanan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2021 – 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan mulai tahun 2022 hingga tahun 2026 dalam upaya mengembangkan amanah pembangunan sektor perikanan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang diembannya. Renstra ini juga merupakan dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, terutama kedalaman analisa terkait dinamika eksternal dan internal yang berkembang akibat minimnya ketersediaan data dan informasi. Sehingga diharapkan penguatan teamwork dan peningkatan kinerja secara professional di lingkungan organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang perikanan. Dalam implementasinya sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini sangat

diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat menentukan suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Perubahan atau revisi Rencana Strategis Dinas Perikanan ini dapat dilakukan apabila terdapat perubahan lingkungan kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang perikanan ke depan. Jika akan dilakukan perubahan atau revisi dokumen Renstra, maka tahapan dan muatan perubahan tersebut tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEPALA DINAS

Ir. MAKKAWARU

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630120 198910 1 003